



Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya



LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2017



Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE
BUPATI DHARMASRAYA

Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 2018



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
INSPEKTORAT

Jl. Lintas Sumatera KM. 1 pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : //http.www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id Email : lra.dharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulau Punjung, Maret 2018


Drs. STABARUDIN
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19620314 198903 1 016



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu:

" **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA**", sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam melaksanakan kinerja, dengan adanya laporan ini diharapkan jadi bahan evaluasi agar kedepannya lebih terukur antara Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan Evaluasi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat Dharmasraya.



Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya atas kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Pulau Pinang, Maret 2018

HUPATI DHARMASRAYA,



Handwritten signature in blue ink

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



Surat Pernyataan telah di Reviu oleh APIP	I
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	Iii
Daftar Isi	V
Bab I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Kondisi Kabupaten Dharmasraya	I-4
1.2 Kedudukan , kewenangan, dan Tugas serta Struktur Organisasi	I-20
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	II-1
2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2017	II-11
2.3 Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	II-11
2.4 Indikator Kinerja Utama	II-12
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	II-14
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2017	II-16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis	III-3
IV. Penutup	IV-1
Lampiran :	
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021	
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Pengukuran Kinerja	
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Tahun 2017 dan 2018	



Tabel 1.1	Tingkat keterenggan Lahan Kabupaten Dharmasraya	I-6
Tabel 1.2	Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	I-7
Tabel 1.3	Luas Lahan Produksi, Produktifitas tanaman perkebunan rakyat kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	I-8
Tabel 1.4	Perkembangan PDRB Kabupaten Dharmasraya	I-12
Tabel 1.5	Jumlah Wajib KTP	I-13
Tabel 1.6	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016	I-13
Tabel 1.7	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	I-14
Tabel 1.8	Persentase pekerja Kabupaten Dharmasraya menurut lapangan usaha utama dan jenis kelamin	I-15
Tabel 1.9	Statistik Kesehatan Dharmasraya Tahun 2015	I-17
Tabel 1.10	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	I-17
Tabel 1.11	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)	I-18
Tabel 1.12	Jumlah SDM Aparatur Kabupaten Dharmasraya Menurut Golongan dan Ruang kepegangatan	I-24
Tabel 1.13	Jumlah SDM Aparatur Kabupaten Dharmasraya menurut tingkat pendidikan	I-26
Tabel 2.1	Visi , Tujuan dan Sasaran yang telah di reviu	II-4
Tabel 2.2	Sasaran Indikator peraturan Bupati yang telah dirubah	II-7
Tabel 2.3	Sasaran sebelum dan setelah reviu Tahun 2016	II-15
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya setelah Reviu	II-18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016	II-21
Tabel 2.6	Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 sebelum dan setelah perubahan	II-25
Tabel 2.7	Alokasi anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2016	II-25
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Satu	III-4
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Dua	III-6



Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Tiga	III-7
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Empat	III-9
Tabel 3.5	Jenis Kasus Kekerasan Per Kecamatan	III-11
Tabel 3.6	Jenis Kekerasan yang dialami Anak-anak	III-12
Tabel 3.7	Partisipasi Perempuan Di pemerintahan Kabupaten Dharmasraya	III-18
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke lima	III-19
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Enam	III-20
Tabel 3.10	RTH yang terbangun pada tahun 2016	III-20
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke tujuh	III-21
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke delapan	III-23
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Sembilan	III-25
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Sepuluh	III-26
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke sebelas	III-27
Tabel 3.16	Ketersediaan Energi untuk Konsumsi perkapita/hari tahun 2014-2016	III-28
Tabel 3.17	Ketersediaan Protein untuk Konsumsi Perkapita/hari/tahun 2014-2016	III-29
Tabel 3.18	Ketersediaan lemak untuk konsumsi perkapita/hari tahun 2014-2016	III-29
Tabel 3.19	Komposisi ketersediaan Zat Gizi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2016	III-30
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke dua belas	III-31
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Tiga belas	III-35
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke empat belas	III-37
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke lima belas	III-38
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke enam belas	III-39
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke tujuh belas	III-41
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke delapan belas	III-42
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke sembilan belas	III-43
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke dua puluh	III-44
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke dua puluh satu	III-46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Dharmasraya	I-4
Gambar 1.2	Jumlah pedagang di Kabupaten Dharmasraya	I-10
Gambar 1.3	Jumlah koperasi per kecamatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016	I-11
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	I-22
Gambar 1.5	Alur Penyusunan Laporan Kinerja	I-27
Gambar 3.1	Penerimaan penghargaan puskesmas berprestasi	III-4
Gambar 3.2	Pemberian Bantuan Bibit ke suku anak dalam	III-09
Gambar 3.3	Lokasi RTH	III-21
Gambar 3.4	Bendungan IRigasi Batang Hari tempat Wisata Batu Bakawik	III-22
Gambar 3.5	Pembangunan Jalan	III-24
Gambar 3.6	Bedah Rumah yang disertai swadaya masyarakat dengan gotong royong	III-27
Gambar 3.7	Penyadapan Getah Karet Oleh Petani	III-33
Gambar 3.8	Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Dharmasraya	III-33
Gambar 3.09	Perkebunan Kelapa Sawit dan Produksi Kelapa sawit Di Kabupaten Dharmasraya	III-34
Gambar 3.10	Penerimaan Laporan hasil Pemeriksaan LKPD	III-40
Gambar 3.11	Candi Pulau Sawah	III-48



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Koperasi Perkecamatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016	I-11
Grafik 1.2	Perkembangan PDRB Kabupaten Dharmasraya	I-12
Grafik 1.3	Dharmasraya Dalam Angka 2016	I-16
Grafik 1.4	Perkembangan IPM	I-18
Grafik 1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	I-19
Grafik 1.6	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.	I-20
Grafik 1.7	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan (31 Desember 2016)	I-25
Grafik 1.8	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Esselon (31 Desember 2016)	1-25
Grafik 1.9	Rekapitulasi PNS berdasarkan Pendidikan (31 Desember 2016)	I-26



BAB - I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di definisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan target Kinerja Instansi Pemerintah selama satu tahun. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja v Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Mengacu RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut diatas serta setelah ada hasil Reviu dari APIP terhadap sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka penyusunan LKjIP Tahun 2017 berisikan laporan pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden Melalui Menpan-RB ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017 yaitu tahun kedua RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target



kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan sasaran strategis instansi Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja juga sebagai salah satu alat untuk memberikan informasi mengenai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2017 serta mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan Kinerja dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.



1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1.2.2 . Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 3.023,25 Km² dimana sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya merupakan lahan pertanian yaitu mencapai 87,74 % dari luas wilayahnya. (Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik)

1.2.3. Topografi

Kondisi topografi Wilayah Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan dataran dengan ketinggian 82 Meter sampai 1.525 Meter diatas permukaan laut, mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :



Tabel 1.1.
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
Jumlah		302.599	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Kondisi geologi Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat Sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera *Fault Zone* yang terbentang sepanjang Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil

1.2.4. Perekonomian.

1. Pertanian

Produktivitas padi, baik padi sawah maupun padi ladang di Dharmasraya pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11,3 persen dari tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya cetak sawah baru di beberapa kecamatan terutama Kecamatan Sitiung. Produktivitas tanaman palawija pada tahun 2017 secara garis besar mengalami penurunan.



Tanaman jagung yang merupakan tanaman dengan luas panen terluas dibandingkan luas panen tanaman palawija yang lain. Jika dibandingkan tahun 2016, luas panen jagung bertambah pada tahun 2017 ini sebesar 143,3 persen, dan peningkatan produktivitas sebesar 13,2 persen. Sementara penurunan produktivitas tertinggi dialami oleh komoditas ubi jalar sebesar 2 persen.

Tabel 1.2. Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Dharmasraya tahun 2017

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Padi		
Luas Tanaman (Ha)	11.686,6	13.011
Produksi (Ton)	55.695,6	63.678,15
Produktivitas (Kuintal/Ha)	4,4	4,9
Jagung		
Luas Panen (Ha)	166	404
Produksi (Ton)	887	2.424
Produktivitas (Kuintal/Ha)	53.43	60
Kedelai		
Luas Panen (Ha)	8	2
Produksi (Ton)	7	2
Produktivitas (Kuintal/Ha)	8,7	10
Kacang Hijau		
Luas Panen (Ha)	4	6
Produksi (Ton)	4	6
Produktivitas (kuintal/Ha)	10	10
Kacang Tanah		
Luas Panen (Ha)	83	52
Produksi (Ton)	123	102
Produktivitas (kuintal/Ha)	14,82	12,29



Ubi Kayu		
Luas Panen (Ha)	100	92
Produksi (Ton)	4.174	4.140
Produktivitas (kuintal/Ha)	417,40	414
Ubi Jalar		
Luas Panen (Ha)	21	16
Produksi (Ton)	328	320
Produktivitas (kuintal/Ha)	156,19	152,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka 2017

Sektor Pertanian dan Perkebunan memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya. Luas Lahan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2017 terjadi penambahan lahan perkebunan karet sebesar 525 Ha. Selain kelapa sawit, komoditas yang mengalami penurunan produktivitas adalah komoditas karet, kelapa, cengkeh, coklat, pinang dan Kopi. Tanaman karet merupakan komoditas perkebunan kedua terbesar di Dharmasraya.

Tabel 1.3. Luas Lahan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Karet		
Luas Tanaman (Ha)	38.432,50	38.626
Produksi (Ton)	34.739,35	36.134
Produktivitas (Kuintal/Ha)	9,03	9,35
Kelapa Sawit		
Luas Panen (Ha)	30.495,19	30.511
Produksi (Ton)	74.020,05	84.867
Produktivitas (Kuintal/Ha)	24,27	27,81
Kopi		
Luas Panen (Ha)	459,00	459
Produksi (Ton)	195,88	392



Produktivitas (kuintal/Ha)	4,26	8,54
Kelapa		
Luas Panen (Ha)	1.293,50	957
Produksi (Ton)	815,06	832
Produktivitas (kuintal/Ha)	6,30	8,69
Pinang		
Luas Panen (Ha)	42,00	61
Produksi (Ton)	17,52	26
Produktivitas (kuintal/Ha)	4,17	4,2
Coklat		
Luas Panen (Ha)	1.984,81	2006
Produksi (Ton)	1.258,04	2718
Produktivitas (kuintal/Ha)	6,34	13,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka 2017

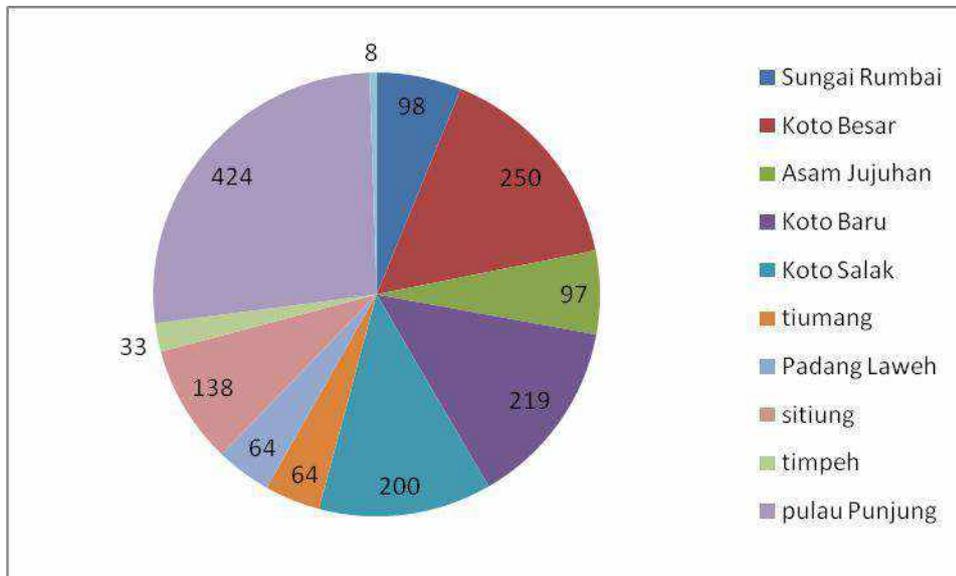
2. Perdagangan

Perdagangan bagi Kabupaten Dharmasraya mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Dengan pendapatan Riil yang lebih tinggi berarti Dharmasraya mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jumlah pedagang yang meliputi pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil pada tahun 2017 adalah sebesar 1.595 pedagang di seluruh wilayah Dharmasraya. Jika ditinjau berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Pulau Punjung adalah Kecamatan paling tinggi jumlah pedagangnya dibandingkan kecamatan lain di Dharmasraya. Jumlah Pedagang di Kecamatan Pulau Punjung adalah sebanyak 424 pedagang. Dari sarana perdagangan, di Dharmasraya terdapat 37 Pasar pada tahun 2017 dan sedikit meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 36 buah pasar. Selain itu terdapat 669 buah kios yang



tercatat pada tahun 2017 dan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 629 Kios.

Gambar 1.2. Jumlah Pedagang di Kabupaten Dharmasraya



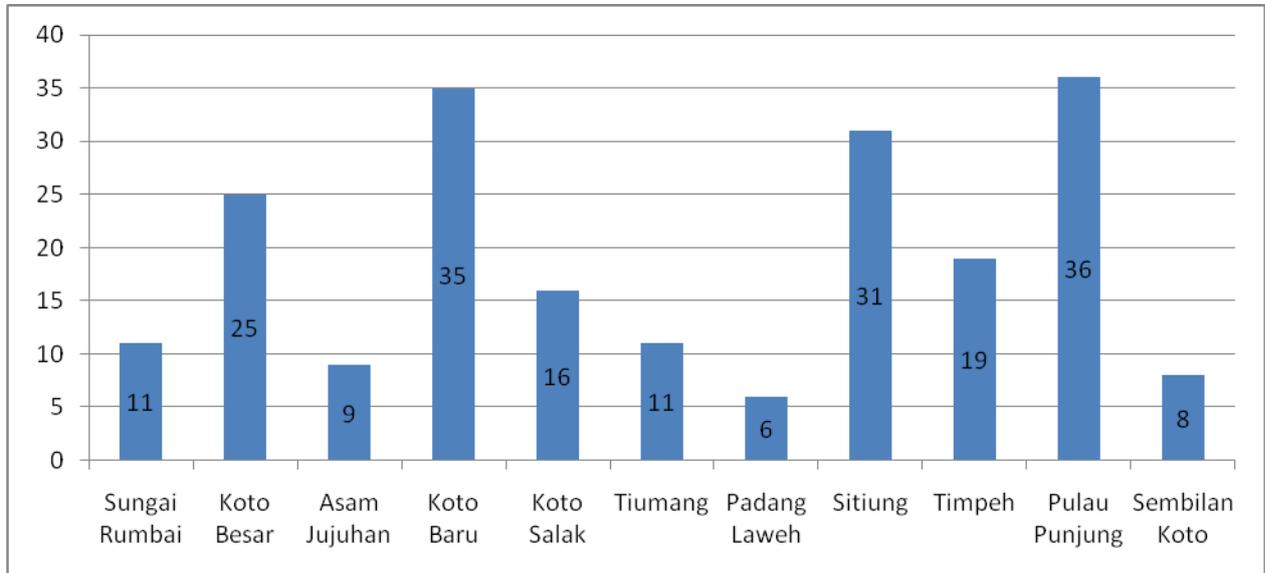
Sumber: Badan Pusat Statistik, Dharmasraya dalam Angka 2017

1. Perusahaan dan Koperasi

Kabupaten Dharmasraya ada beberapa perusahaan menurut bentuk badan hukum yang terdiri dari Perseroan Terbatas, CV/Firma, Koperasi, Perorangan dan lainnya. Salah satu yang tumbuh paling pesat yaitu Koperasi. Pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, tercatat jumlah koperasi sebanyak 207 buah atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya tercatat 201 buah. Dari 207 koperasi yang terdapat di Dharmasraya, 124 diantaranya merupakan koperasi dengan jenis koperasi lainnya (bukan termasuk KUD, KPR dan KOPKAR), 50 Unit KUD, 18 Unit KPR dan 15 Unit KOPKAR. Kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru yaitu 36 Unit Koperasi.



Grafik I.1
Jumlah Koperasi per Kecamatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

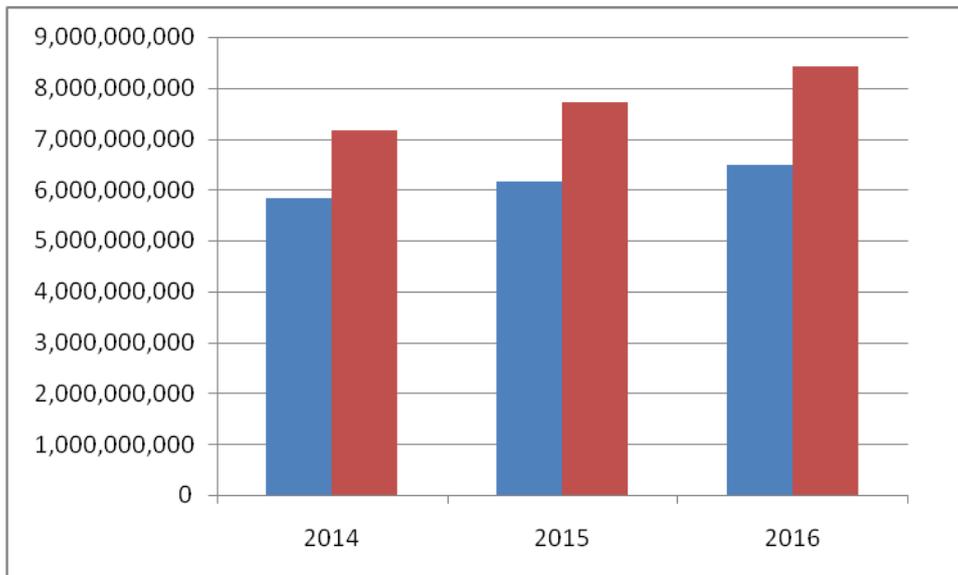


Sumber: Badan Pusat Statistik, Dharmasraya Dalam Angka 2017

2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karakteristik penyebaran dari perekonomian suatu daerah. Sejalan dengan distribusi PDRB nasional, sektor perekonomian tertinggi di Kabupaten Dharmasraya adalah pada sektor pertanian sebesar 31,59 persen. Mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, dimana sektor pertanian menyumbang sebesar 31,03 persen. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 sebesar 5,40 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 5,80 persen di tahun 2015 dan 6,33 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan laju ekonomi Kabupaten Dharmasraya cenderung menurun.

Grafik 1.2



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2017

Tabel 1.4. Perkembangan PDRB Kabupaten Dharmasraya

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Tahun 2016
PDRB ADHK (Milyar Rp.)	5.821,68	6.159,60	6.488,67
PDRB ADHB (Milyar Rp.)	7.174,56	7.718,99	8.433,53
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,33	5,80	5,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2017

1.2.6 Sosial Budaya

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 2.78% per tahun hingga pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 229.313 orang yang terdiri dari 118.801 laki-laki dan 110.512 perempuan.



Untuk wajib KTP jumlah terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 25.767 Jiwa yang dan yang terkecil di Kecamatan Padang Laweh sebanyak 3.767 jiwa seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. Jumlah Wajib KTP

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KOTO BARU	10.085	9.971	20.056
2.	PULAU PUNJUNG	13.044	12.723	25.767
3.	SUNGAI RUMBAI	7.025	6.727	13.757
4.	SITIUNG	8.857	8.643	17.500
5.	SEMBILAN KOTO	2.780	2.645	5.425
6.	TIMPEH	5.366	5.108	10.474
7.	KOTO SALAK	5.860	5.850	11.710
8.	TIUMANG	4.347	4.143	8.490
9.	PADANG LAWEH	1.934	1.833	3.767
10.	ASAM JUJAHAN	2.694	2.514	5.208
11.	KOTO BESAR	8.489	8.390	16.879
KABUPATEN		70.486	68.547	138.033

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Tabel 1.6. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (KM2)	JUMLAH JIWA			SEX RATIO	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
			L	P	TOTAL		
1.	SUNGAI RUMBAI	51,06	12.336	11.225	23.561	1,10	461,35
2.	KOTO BESAR	560,57	13.096	12.209	25.305	1,07	45,14
3.	ASAM JUJAHAN	485,41	8.854	7.471	16.325	1,19	34,63
4.	KJOTO BARU	221,20	16.992	16.181	33.173	1,05	149,80
5.	KOTO SALAK	121,45	8.434	8.169	16.603	1,03	136,71
6.	TIUMANG	134,43	6.044	5.643	11.687	1,07	88,92
7.	PADANG LAWEH	60,62	3.918	3.490	7.408	1,12	122,61
8.	SITIUNG	124,57	13.360	12.624	25.984	1,06	208,59
9.	TIMPEH	323,01	7.750	7.283	15.033	1,06	46,54
10.	PULAU PUNJUNG	443,16	23.715	22.012	45.727	1,08	103,18



11.	IX KOTO	500,50	4.302	4.205	8.507	1,02	17,00
JUMLAH			118.801	110.512	229.313	1,08	73,80

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Dharmasraya

Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Sungai Rumbai yaitu sebesar 461 orang per Km², dan paling jarang penduduknya di Kecamatan IX Koto yakni 17 orang per Km². Jika dilihat kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 sebesar 73,80 jiwa/Km².

B. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 sebesar 65,88. Artinya sekitar 66 persen penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja yang menggambarkan peluang seorang calon pekerja untuk menggantikan posisi yang tersedia saat ini. Sementara tingkat Kesempatan kerja kabupaten Dharmasraya tahun 2017 sebesar 96,49 (67,00) persen. Artinya setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 67 orang yang bekerja.

Tabel 1.7. Statistik Ketenagakerjaan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
Angkatan Kerja	68.859	34.002	102.861	100
Bekerja	66.383	32.872	99.255	94,49
Pengangguran	2.476	1.130	3.606	3,51
Bukan angkatan kerja	12.454	40.815	53.269	100
Sekolah	5.783	7.938	13.721	25,76
Mengurus Rt	2.316	29.674	31.990	60,05
Lainnya	4.355	3.203	7.558	14,19
Total	81.313	74.817	156.130	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja perempuan diberbagai sector, kecuali



sector Perdagangan hotel dan restoran,serta sector jasa-jasa yang tenaga kerja perempuan memiliki jumlah yang lebih besar. Sektor pertanian masih memiliki kontribusi tertinggi dalam ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebanyak 52.668 pekerja. Sektor kedua yang memiliki kontribusi tertinggi kedua adalah sector perdagangan hotel dan restoran, yaitu sebanyak 19.097 pekerja.

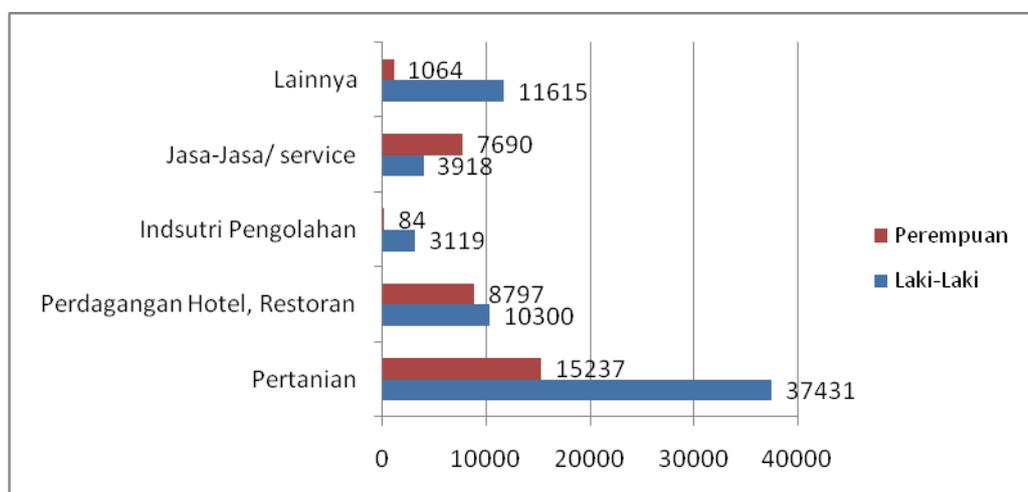
Tabel 1.8. Jumlah Pekerja Kabupaten Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	37.431	15.237	52.668
Perdagangan hotel, restoran	10.300	8.797	19.097
Industry pengolahan	3.119	84	3.203
Jasa-jasa/service	3.918	7.690	11.608
Lainnya	11.615	1.064	12.679
Total	66.383	32.872	99.255

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.3

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

C. Kesehatan



Aspek kesehatan merupakan unsur yang penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan lingkungan yang memadai, dan mutu makanan yang mempengaruhi. Jika dilihat dari segi fasilitas kesehatan jumlah rumah sakit, puskesmas, dan pustu pada tahun 2017 masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk tenaga kesehatan, pada tahun 2017 terdapat 46 tenaga medis, 141 perawat, 121 bidan, 17 tenaga farmasi dan 70 tenaga kesehatan lainnya. Dari jumlah dokter, kebanyakan adalah dokter umum dan banyak bertugas di Puskesmas. Sementara semua dokter spesialis bertugas di RSUD. Bayi lahir tahun 2017 di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4.085, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 1.9.
Statistik Kesehatan Dharmasraya Tahun 2017

Indikator	2015	2016
Banyaknya Tenaga Kesehatan		
- Dokter	75	74
- Perawat	218	141
- Bidan	142	121
Banyaknya Fasilitas Kesehatan		
- Rumah sakit	1	1
- Puskesmas	13	13
- Pustu	44	44
Kesehatan Bayi		
- Bayi Lahir	3.957	4.085
- BBLR	161	102

Sumber: Badan Pusat Statistik



Tabel 1.10.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Balai	Polindes
SUNGAI RUMBAI			1	20	4	6
KOTO BESAR			1	21	3	10
ASAM JUJAHAN			1	13	1	6
KJOTO BARU			1	32	2	4
KOTO SALAK			1	23	1	4
TIUMANG			1	17	-	7
PADANG LAWEH			1	10	-	4
SITIUNG			2	31	3	14
TIMPEH			1	24	-	6
PULAU PUNJUNG	1		2	36	7	8
IX KOTO			1	16	1	6
DHARMASRAYA	1	0	13	243	22	75

Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Dharmasraya, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 70,25.

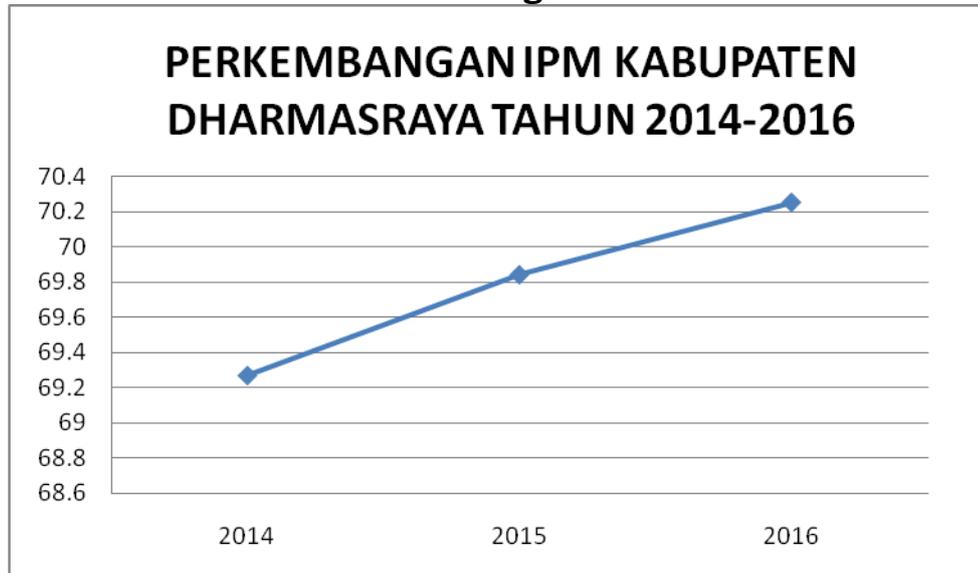
Tabel 1.11. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2016

No	Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
1	IPM	69,27	69,84	70,25
2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,76	70,16	70,30
3	Estimated Years School (%)	12,19	12,36	12,39
4	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,99	8,03	8,23
5	Pengeluaran per-kapita (Ribu Rp.)	10.550	10.713	10.781

Sumber: Badan Pusat Statistik



Grafik 1.4
Perkembangan IPM



Sumber: Badan Pusat Statistik

E. Pendidikan

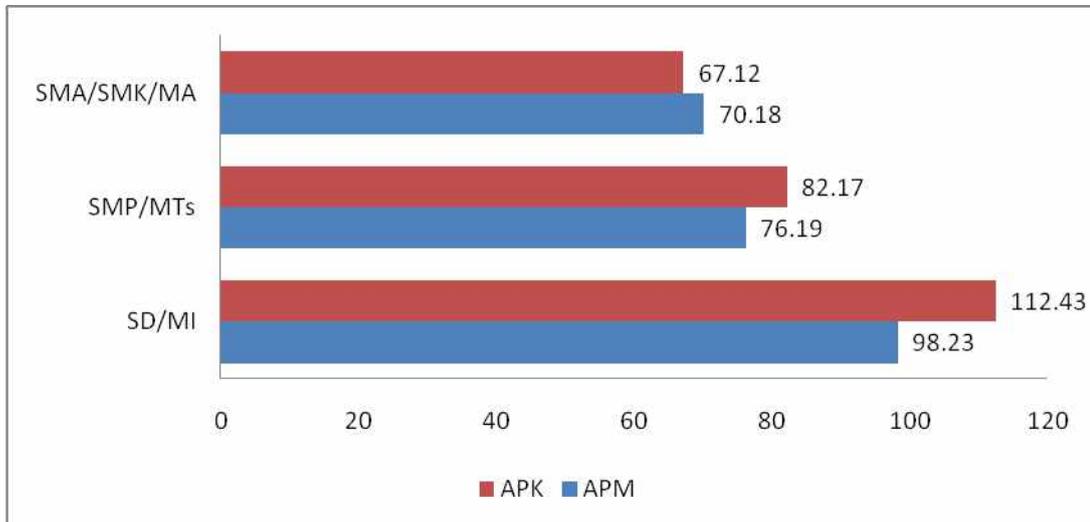
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk usia 7-12 tahun, SMP untuk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk usia 16-18 tahun. APM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 menurun di jenjang pendidikan SD dan SMP masing - masing 98,23, 76,19, dan meningkat di SMA yaitu 67,12. Tingkat kecukupan tenaga pengajar di suatu sekolah dapat dilihat dari indikator rasio murid-guru. Rasio ini menunjukkan banyaknya siswa yang berada di bawah pengawasan seorang guru. Pada tahun ajaran 2016/2017 rata-rata seorang guru SD/ sederajat mengajar 16 murid, guru SMP/ sederajat mengajar 11 murid, guru SMA/ .sederajat mengajar 9 murid. Rasio guru tersebut sudah termasuk ideal, namun belum bisa dipastikan penyebarannya.

Untuk mencapai salah satu target MDG's yaitu menjamin bahwa sampai tahun 2017, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan sekolah dasar, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah.



Grafik. 1.5

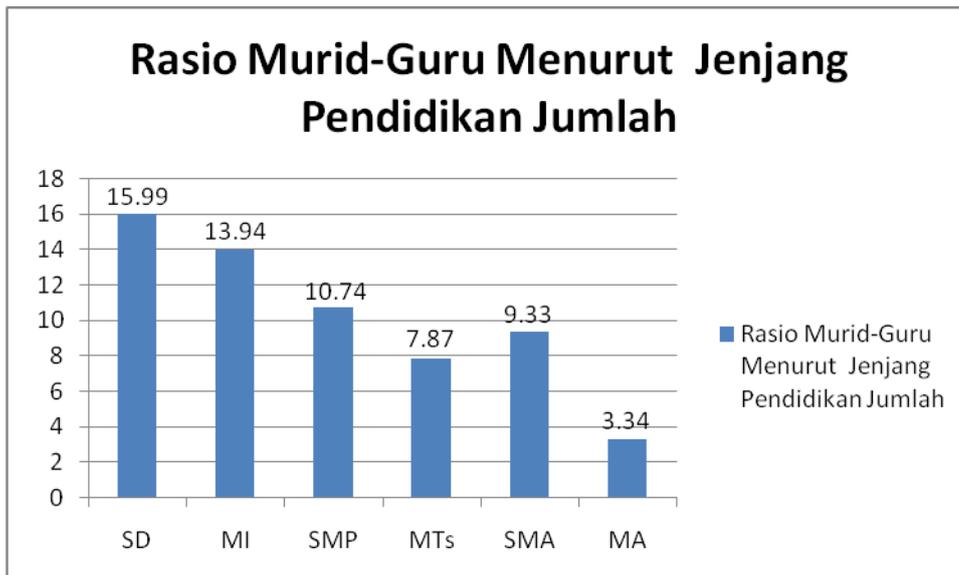
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.6

**Rasio Murid –Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2. KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI



1.3.1 Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Dharmasraya.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik

1.3.2 Struktur Organisasi

Pada tahun 2017 telah dilakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, dengan susunan sebagai berikut:



- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olah raga;
 3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial, bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub bidang perlindungan masyarakat;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;



12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 16. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
 17. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
 2. Kecamatan Koto Baru Tipe A;
 3. Kecamatan Koto Besar Tipe A;
 4. Kecamatan Koto Salak Tipe A;
 5. Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
 6. Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
 7. Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
 8. Kecamatan Sitiung Tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
 10. Kecamatan Timpeh Tipe A; dan
 11. Kecamatan Tiumang Tipe A.



1.3.3 Sumber Daya Aparatur

Kabupaten Dharmasraya memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Dharmasraya per 31 Desember 2017 sebanyak 3.630 orang.

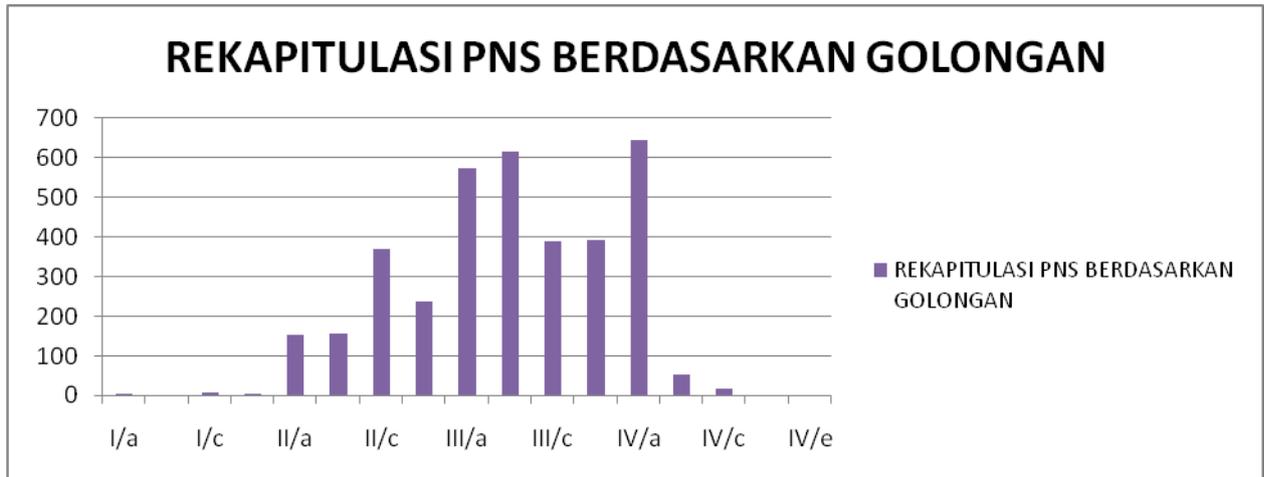
Tabel 1.12. Jumlah SDM Aparatur Kabupaten Dharmasraya menurut Golongan dan Ruang Kepangkatan

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAH
1	Juru Muda	I/a	6
2	Juru Muda Tk. I	I/b	2
3	Juru	I/c	7
4	Juru Tk. I	I/d	4
5	Pengatur Muda	II/a	153
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	157
7	Pengatur	II/c	372
8	Pengatur Tk. I	II/d	237
9	Penata Muda	III/a	575
10	Penata Muda Tk. I	III/b	615
11	Penata	III/c	391
12	Penata Tk. I	III/d	393
13	Pembina	IV/a	645
14	Pembina Tk. I	IV/b	54
15	Pembina Utama Muda	IV/c	19
16	Pembina Utama Madya	IV/d	0
17	Pembina Utama	IV/e	0
TOTAL			3.630

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan untuk golongan III keatas mencapai 54,38 % yaitu sejumlah 1.974, sedangkan untuk golongan 1 sampai II mencapai 25,84 yaitu sejumlah 938.

GRAFIK REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN (31 DESEMBER 2017)



Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.13. Jumlah SDM Aparatur Kabupaten Dharmasraya menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	9
2	SMP	15
3	SMA	420
4	D1	29
5	D2	126
6	D3	568
7	D4	30
8	S1	2257
9	S2	176
10	S3	0
TOTAL		3.630

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya

Dari data diatas dapat dilihat jumlah ASN yang tingkat pendidikannya sarjana 58, 45% sedangkan ASN yang tingkat pendidikannya setara SD sampai D4 masih tinggi 41, 54 %, untuk itu perlu peningkatan pendidikan.

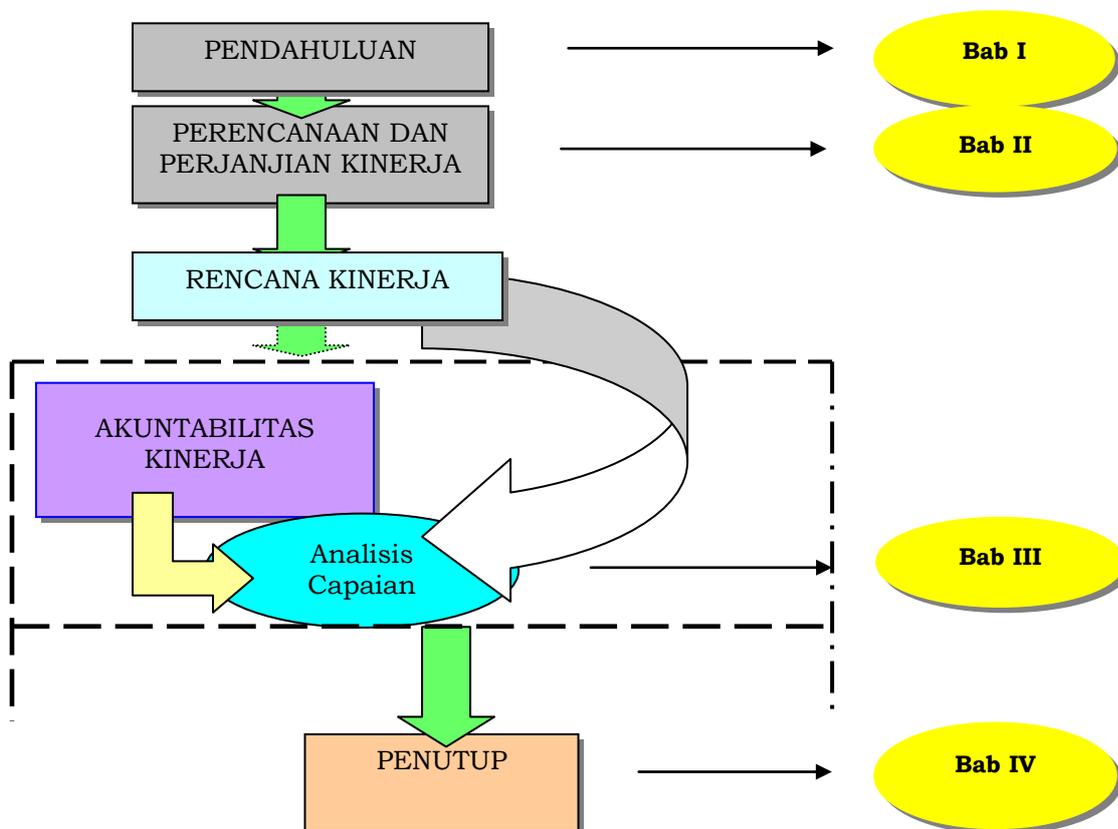
1.3.4 Sistematika Penulisan Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan



Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi serta disandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 dan target perencanaan menengah daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagiperbaiki kinerja di masa datang. Dengan pola pikir demikian, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 diilustrasikan dalam gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2
Alur Penyusunan Laporan Kinerja





Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah serta realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

Bab IV - Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB - II PERJANJIAN KINERJA



2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016– 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, hasil pemilihan Kepala Daerah terpilih, yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2016, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun, agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.



1. Pernyataan Visi dan Misi

VISI KABUPATEN DHARMASRAYA

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana pemerintah akan berjalan dengan segala komitmen agar berjalan dengan konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang kedepan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

"MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA "

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.



Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis atau prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

MISI KABUPATEN DHARMASRAYA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.



6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah direviu

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat
	Menciptakan Masyarakat cerdas dan berkarakter	Meningkatnya tingkat pendidikan
	Meningkatkan kulaitas dan peran tenaga kerja	Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompentensi
	Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan terhadap anak	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak
	Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuj menunjang ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan
	Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat
		Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	Peningkatan Tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
	Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan	Meningkatkan produksi dan produktvitas pertanian dan perikanan
	Meningkatkan ketahanan pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan
	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan



Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	Peningkatan tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah
		Meningkatnya kemandirian fiskal
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	Melakukan pembangunan berbasis nagari	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya



INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016-2021

N o.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan	BPS
3	Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey	Dinas Nakertrans	BPS
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	Memperlihatkan perbandingan antara Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran semakin baik	Dinas Nakertrans	BPS
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Pengukuran peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pengukuran ini mencakup partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB



N o.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	Persen	Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	Rasio rumah layak huni	Persen	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
8	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	Tersedianya akses terhadap air minum yang layak	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Akses Sanitasi Layak	Persen	Tersedianya akses sanitasi yang layak	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	BPS	BPS
		Pertumbuhan PDRB	Indeks	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	BPS	BPS
		PDRB Perkapita	Juta	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan	BPS	BPS
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Jumlah produksi padi	Ton	Total produksi padi dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi jagung	Ton	Total produksi jagung dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi karet	Ton	Total produksi karet dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi sawit	Ton	Total produksi sawit dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi kakao	Kg	Total produksi kakao dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi daging sapi	Ton	Total populasi ternak sapi dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi ikan	Ton	Total produksi ikan dalam setahun	Dinas Pangan dan Perikanan	BPS



N o.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
11	Ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan kalori dan protein per kapita	Kkal/Kep/hari	Merupakan salah satu dari indikator SPM dalam Permentan Nomor Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan
12	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	Koperasi	UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi	Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag
		Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	persen	Persentase jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag
13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Pengukuran terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan dan citra satelit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	BKD	BKD
		Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat	Setda	Setda
		Nilai LPPD	Nilai	Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran	Setda	Setda
15	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	Persen	Persentase pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan yang terdapat pada RKPD terhadap RPJMD	BAPPPEDA	BAPPPEDA
16	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	Persentase ketergantungan terhadap dana transfer	BKD	BKD
17	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	Persentase jumlah Nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



N o.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
						Desa
18	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	Angka	Persentase cagar alam budaya yang terdapat di Dharmasraya dan telah teregritasi	Dinas Budparpora	Dinas Budparpora



Tabel 2.3
Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu
Tahun 2017

NO	SASARAN SEBELUM DIREVIU	NO	SASARAN SETELAH DIREVIU
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	2	Meningkatnya tingkat pendidikan
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah	3	Mengurangi pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi
4	Tertanganinya permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak
5	Meningkatnya fungsi pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat	5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat
6	Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi masyarakat	6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan
7	Meningkatnya Akses transportasi dan terbebas dari Nagari tertinggal serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat
8	Meningkatnya wilayah pelayanan Pnyediaan air minum perpipahan	8	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
9	Meningkatnya penyediaan perumahan bagi masyarakat Miskin	9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
11	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat tani melalui peningkatan Produksi pertanian peternakan dan Perikanan	11	Ketersediaan dan cadangan pangan
12	Meningkatnya peran koperasi untuk kesejahteraan masyarakat	12	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan
14	Meningkatnya Akuntabilitas tata laksana penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi Kinerja aparaturn daerah	14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah
15	Meningkatnya pelaksanaan tahapan pembangunan daerah sesuai Mekanisme yang ada	15	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah
16	Meningkatkan pemanfaatan e-government dalam pembangunan daerah.	16	Meningkatnya kemandirian fiskal
17	Meningkatnya pemeberdayaan masyarakat desa/nagari dalam rangka pembangunan	17	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari
18	Meningkatnya Khazanah dan Warisan Budaya Masyarakat Dharmasraya	18	Tertersedianya pelestarian warisan budaya Dharmasraya



2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Dharmasrayan dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2017.

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihakpihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatankegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturuturut diarahkan untuk mencapai sasaran.



2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.4

**Target Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Setelah Reviu**

NO	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Angka harapan hidup	Tahun	70,57
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,39
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,70
5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,99
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,91
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	47,47
8	Persentase masyarakat miskin	Persen	6,76
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	73,48
10	Rasio rumah layak huni	Persen	87,88



NO	Indikator kinerja	Satuan	Target
11	Akses air minum layak	Persen	16
12	Akses Sanitasi Layak	Persen	39,79
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,42
14	Pertumbuhan PDRB	Indeks	5,66
15	PDRB Per Kapita	Juta	36.000
16	Jumlah produksi padi	Ton	59.285
17	Jumlah produksi jagung	Ton	20.000
18	Jumlah produksi karet	Ton	37.363
19	Jumlah produksi sawit	Ton	87.500
20	Jumlah produksi kakao	Kg	2.550.000
21	Jumlah produksi daging sapi	Ton	6.000
22	Jumlah produksi ikan	Ton	16.000
23	Jumlah ketersediaan kalori dan protein per kapita	Kkal/Kep/hari	2.400
24	Persentase koperasi aktif	persen	50
25	Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	persen	9
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,5
27	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	WTP
28	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	60,00
29	Nilai LPPD	Nilai	2,9
30	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPd terhadap RPJMD	Persen	100
31	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	71,83
32	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	50
33	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	Persen	7



2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2017

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,57
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,39
3	Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,70
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,99
4	Meningkatnya kesetaraan	Indeks Pembangunan	Indeks	88,91



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
	gender dan terpenuhinya hak anak	Gender		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	47,47
5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	Persen	6,76
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	73,48
7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	Rasio rumah layak huni	Persen	87,88
8	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	16
		Akses Sanitasi Layak	Persen	39,79
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,42
		Pertumbuhan PDRB	Indeks	5,66
		PDRB Per Kapita	Juta	36.000
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Jumlah produksi padi	Ton	59.285
		Jumlah produksi jagung	Ton	20.000
		Jumlah produksi karet	Ton	37.363
		Jumlah produksi sawit	Ton	87.500
		Jumlah produksi kakao	Kg	2.550.000
		Jumlah produksi daging sapi	Ton	6.000
		Jumlah produksi ikan	Ton	16.000
11	Ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan kalori dan protein per kapita	Kkal/Kep/hari	2.400
12	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	persen	50
		Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	persen	9
13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,5
14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	WTP
		Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	60,00
		Nilai LPPD	Nilai	2,9
15	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	Persen	100
16	Meningkatnya kemandirian	Rata-rata ketergantungan	Persen	71,83



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
	fiskal	dana transfer		
17	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	50
18	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	Persen	7

2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya yang berada pada SKPD kinerja yang diperjanjikan oleh Bupati Dharmasraya, dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 933.395.300.327,- (sebelum perubahan) dan belanja langsung dan belanja tidak langsung Rp. 995.128.039.744,- (setelah perubahan), dengan tabel berikut:

Tabel 2.6
Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 Sebelum dan Setelah Perubahan

NO	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Belanja Tidak Langsung	396.022.164.959,-	433.051.077.374,-
2.	Belanja Langsung	537.373.135.368,-	562.076.962.370,-
	Jumlah	933.395.300.327,-	995.128.039.744,-

Sumber: BKD Kabupaten Dharmasraya

Uraian lebih lanjut mengenai Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dapat dilihat dalam lampiran 2 (terlampir)



Tabel 2.7

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

NO.	SASARAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	34,895,958,300,-
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	49,341,667,735,-
3	Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompetensi	573,056,775,-
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	2,693,465,950,-
5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	1,693,134,350,-
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	3,793,996,500,-
7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	510,866,160,-
8	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	10,020,813,000,-
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	1,134,802,700,-
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	2,326,183,550,-
11	Ketersediaan dan cadangan pangan	1,382,543,660,-
12	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	1,076,318,500,-
13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	4,304,173,350,-
14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah	4,171,541,624,-
15	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	3,532,533,700,-
16	Meningkatnya kemandirian fiskal	904,094,899,-
17	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari	2.344.251.250,-
18	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	1,356,857,915

Sumber: BKD Kabupaten Dharmasraya



BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA



A kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, RKT Tahun 2016, RKPD Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

1. > 85 : sangat berhasil
2. $70 < X \leq 85$: berhasil
3. $55 < X \leq 70$: cukup berhasil
4. < 55 : tidak berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.



Capaian Sasaran

$$= \frac{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

3.2. Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja Per Sasaran

Secara umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2017, sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesatu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Angka harapan hidup	Tahun	70,57	70,30	99,6	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					99,6	Sangat berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber: Laporan Kinerja SKPD Tahun 2017 (Data diolah)

Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (satu) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah **sangat berhasil dengan nilai 99,6**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017, diperoleh usia harapan hidup pada tahun 2017 adalah 70,30 dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 70,16. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya :

1. Meningkatkan mutu dan akses kesehatan masyarakat yang tercapai melalui:
 - Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terstandar, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Pada tahun 2017, Kabupaten Dharmasraya telah memiliki 7 Puskesmas yang ter akreditasi, 2 diantaranya **Terakreditasi Utama**, yaitu Puskesmas Sungai Dareh, dan Puskesmas Sitiung I.
- Akreditasi Puskesmas tebagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;
1. Tidak Akreditasi
 2. Terakreditasi dasar
 3. Terakreditasi madya
 4. Terakreditasi utama, dan
 5. Terakreditasi paripurna

Standar akreditasi disusun dalam 9 Bab dengan 776 elemen penilaian (EP)

Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EP

Bab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Resiko (PMMR) dengan 32 EP



Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 101 EP

Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EP

Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) dengan 29 EP

Bab VII. Layanna Klinis yang Berorientasi PAsien (LKBP) dengan 151 EP

Bab VIII. Manajemen Penunjang LAYanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP

Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP

Ketentuan Kelulusan Akreditasi PUSKESMAS

Tidak terakreditasi Bab I, II $\leq 75\%$, Bab IV, V, VII $\leq 60\%$, Bab III, VI, VIII, IX $\leq 20\%$

Terakreditasi dasar: Bab I, II $\geq 75\%$, Bab IV, V, VII $\geq 60\%$, Bab III, VI, VIII, IX $\geq 20\%$

Terakreditasi madya: Bab I, II, IV, V $\geq 75\%$, Bab VII, VIII $\geq 60\%$, Bab III, VI, IX $\geq 40\%$

Terakreditasi utama: Bab I, II, IV, V, VII, VIII $\geq 80\%$, Bab III, VI, IX $\geq 60\%$

Terakreditasi paripurna: semua Bab $\geq 80\%$

- Selain Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Dharmasraya juga telah terakreditasi.
- Meningkatnya sarana Puskesmas seperti Penambahan Puskesmas Beringin Sakti yang diresmikan pada Tahun 2017, pembangunan Puskesmas di Gunung Medan, dan peningkatan status Puskesmas Sungai Rumbai menjadi rumah sakit type D, serta renovasi Pustu dan Polindes.
- Meningkatnya prasarana kesehatan, seperti penambahan alat kryoterapi untuk penanganan pertama bagi wanita yang terdeteksi mengidap penyakit kanker servix, alat ini dioperasikan di Puskesmas Sitiung I, penambahan alat smokerlyzer yang berfungsi untuk mengukur kadar karbomonoksida dalam darah, serta melengkapi peralatan laboratorium di Puskesmas dan Labkesda
- Meningkatnya kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pada tahun 2016, kepesertaan JKN sebanyak 88.536 orang, sedangkan pada



tahun 2017, kepesertaan JKN meningkat 12.8% menjadi 99.947 orang, dan ditargetkan pada tahun 2019, Kabupaten Dharmasraya mampu untuk *Total Coverage* atau seluruh masyarakat memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

- Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin, masyarakat miskin yang mendapat PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN tahun 2016 adalah 75.538 orang, masyarakat yang menerima PBI ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 80.830 orang, dengan meningkatnya masyarakat miskin yang menerima PBI JKN, berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Dharmasraya
- Aktifnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dalam kegiatan Germas, pelayanan kesehatan dilakukan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan berintegrasi dengan lintas sektor.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada kegiatan GERMAS adalah, sikat gigi masal, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis, demo CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), makan buah dan sayur bersama, senam bersama, sedangkan lintas sektor yang berintegrasi melaksanakan kegiatan seperti pelestarian permainan tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, serta promosi dan eksplorasi keindahan alam Kabupaten Dharmasraya yang berintegrasi dengan Dinas Pariwisata.

2. Meningkatkan mutu status kesehatan masyarakat yang tercapai melalui:

- Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan, hal ini dibuktikan oleh keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan acara GERMAS. Meningkatnya jumlah desa siaga aktif, pada tahun 2016, jumlah desa siaga aktif sebanyak 45 desa, sedangkan tahun 2017, meningkat menjadi 52 desa
- Nagari siaga aktif adalah nagari/kelurahan/desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) secara mandiri
- Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar pada masyarakat, pada tahun 2016 penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih berjumlah 162.713 orang,



dan akses sanitasi yang layak sebanyak 171.417 orang, hal ini meningkat pada tahun 2017, dimana penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih sebanyak 167.583 orang, dan akses sanitasi yang layak sebanyak 183.478 orang

- Adanya deteksi dini terhadap faktor-faktor resiko penyakit tidak menular
- Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi dan balita. Beberapa pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi dan balita adalah, promosi kesehatan mengenai 1000 HPK yang menentukan masa depan masyarakat, program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Pemberian tablet Fe kepada ibu hamil, Posyandu kepada bayi dan Balita, imunisasi dasar lengkap pada bayi, pemberian makanan tambahan kepada balita yang terindikasi kekurangan gizi, pemberian MP-ASI.
- Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus untuk anak sekolah, remaja dan lansia, sehingga terbentuk kemandirian untuk hidup sehat pada kelompok umur tersebut, pelayanan kesehatan pada lansia tahun 2016 sebanyak 74.07% dari seluruh sasaran lansia yang ada di Dharmasraya, hal ini meningkat di tahun 2017 menjadi 79.56 % dari seluruh lansia yang ada di Dharmasraya, sedangkan anak sekolah yang mendapatkan penjangkaran dan pelayanan kesehatan pada tahun 2016 adalah 97.3% dari seluruh anak sekolah yang ada, hal ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 98.1%.
- Meningkatnya status gizi masyarakat melalui Pos Gizi masyarakat, pendampingan nagari sadar gizi, hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah penderita gizi buruk dimana penderita gizi buruk pada tahun 2016 adalah sebanyak 22 orang, jauh menurun pada tahun 2017 dimana penderita gizi buruk berjumlah 8 orang, selain itu, tahun 2016, berat bayi lahir rendah (BBLR) tahun 2016 sebanyak 2.5% dari seluruh bayi lahir hidup, menurun di tahun 2017 menjadi 2.2% bayi yang BBLR.



**SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA TINGKAT
PENDIDIKAN**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kedua tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja tahun 2017.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke dua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,23	99,03	Sangat Berhasil
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,56	101,37	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					100,2	Sangat berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber: Laporan Kinerja SKPD Tahun 2017 (Data diolah)

Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (dua) ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat berhasil dengan nilai 100,2**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 di dapatkan indikator sebagai berikut :

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 8,23 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka tahun 2016 yaitu 8.06. Angka ini meningkat karena beberapa faktor pendukung diantaranya:

- Sekolah sudah merata di tiap kecamatan sehingga mudah dijangkau.
- Fasilitas sarana dan prasarana sudah mendukung
- Peningkatan partisipasi dari orang tua siswa akan pentingnya pendidikan

➤ Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 adalah sebesar 12,56 tahun, artinya bahwa lama sekolah yang dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12 setengah tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester I).



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ketiga, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,70	66,50	98,22	Sangat Berhasil
2	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	2.99	3,08	96.99	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					97.60	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran (Nilai Mean)					92,5	

Sumber data : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Untuk mewujudkan sasaran strategis 3 (tiga) ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat Berhasil dengan Nilai 97,60** Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:



➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Merupakan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tahun ini sebesar 66,50% yang menggambarkan bahwa penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu komunitas usia 15 tahun keatas. Angka ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia kerja, 65-66 tahun orang diantaranya merupakan angkatan kerja aktif secara ekonomi. Kalau dilihat dari perkembangan TPAK ini, untuk tahun ini memang terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya TPAK adalah faktor umur dan pendidikan, disamping faktor – faktor lainnya adalah dukungan program dan kegiatan yang ada pada urusan tenaga kerja. Walaupun capaian TPAK masih rendah dari tahun sebelumnya tetapi telah dilakukan beberapa kegiatan unggulan diantara nya :

- Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan ini merupakan salah satu fasilitasi oleh pemerintah dalam penyaluran dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dari target 60 orang terealisasi 117 orang. Capaian ini cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan swasta melakukan kerja sama informasi dengan Dinas dalam rekrutmen karyawannya.

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Kegiatan ini merupakan suatu penyampaian informasi bursa kerja kepada masyarakat terhadap peluang kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dari yang ditargetkan 12 perusahaan yang akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan terealisasi 100% yang artinya 12 perusahaan yang dimaksud semuanya menyampaikan informasi peluang kerja ke Dinas Ketenagakerjaan. Pencapaian ini tidak luput karna adanya komunikasi yang intensif antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

➤ Tingkat Pengangguran Terbuka di Dharmasraya

Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka tercapai sebesar 3.08% dengan target sebesar 2,99% atau sama dengan pencapaian sebesar 103,01%. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran usia angkatan kerja berjumlah 3.171 orang sedang penduduk angkatan kerja berjumlah 156.130 orang sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berjumlah sekitar 3,51%. Peningkatan



jumlah pengangguran di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu :

- Beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya mengurangi karyawan disebabkan defisit keuangan didalam perusahaan itu sendiri.
- Tamatan beberapa perguruan tinggi di Dharmasraya ditempatkan secara langsung pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa solusi pada tahun 2017 telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan diantaranya :

- Untuk penempatan dan perekrutan tenaga kerja yang ada di pemerintah dan perusahaan diwajibkan memiliki kartu pencari kerja dengan harapan pendataan tenaga penganggura bisa terdeteksi secara aktual.
- Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ke perusahaan-perusahaan
- Menambah personil dan sarana untuk menunjang kegiatan Balai Latihan Kerja sehingga para pencari kerja mempunyai keahlian sebelum ditempatkan di tempat kerja.

**SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DAN
TERPENUHINYA HAK ANAK**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis keempat, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,91	88,29	99,30	Sangat Berhasil
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	47,47	47,47	100	Sangat Berhasil
Rata-rata data kelompok tertimbang					99,65	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran (nilai Mean)						92,5

Sumber Data : BPS Kabupaten Dharmasraya



Untuk mewujudkan sasaran strategis 4 (empat) tercapai dengan **sangat berhasil** nilai indeks **99,65** ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Daerah . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017

➤ Indeks Pembangunan Gender

Angka Indeks Pembangunan Gender di dapatkan dari perbandingan angka harapan hidup, Harapan lama sekolah, Rata- rata lama sekolah, pengeluaran perkapita, Indeks Pembangunan Manusia antara laki- laki dan perempuan. Angka Harapan Hidup dimana pada tahun 2017 di dapatkan indeks, laki-laki 68,19 serta perempuan 72,01. Harapan Lama Sekolah sebesar 11,99 untuk laki-laki serta 12,46 untuk perempuan dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,59 untuk laki-laki dan 7,98 untuk perempuan. Pengeluaran perkapita pada tahun 2017 untuk laki-laki Rp. 16.165 dan perempuan Rp. 7.284. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 didapatkan indeks 74,26 dan perempuan 65,56. Dari Indikator tersebut di dapatkan angka Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2017 sebesar 88,29. Hal ini didukung oleh adanya program yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan perempuan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang pada tahun 2017 sebesar Rp. 365.671.750,-.

➤ Indeks Pemberdayaan Gender

Pengukuran peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 mencapai indeks 47,47 atau sama dengan target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 47,47. Peran aktif perempuan ini mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2017, perempuan yang aktif berpolitik hanya sebesar 0,04% sedangkan pada peran sebagai Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 3.673, peran perempuan adalah sebesar 62,18% dengan jumlah 2.284.



**SASARAN STRATEGIS 5
MENGURANGI PERMASALAHAN
SOSIAL DI MASYARAKAT**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kelima tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja tahun 2017.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase masyarakat miskin	%	6,76	6,68	98,81	Sangat Berhasil
Rata-rata data kelompok tertimbang					98,81	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran (nilai Mean)						92,5

Sumber Data : DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 5 (lima) tercapai dengan **sangat berhasil dengan capaian 98,81 %** ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Daerah . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017.

➤ **Persentase Masyarakat Miskin**

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 sebanyak 16.240 jiwa atau 7.16 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Pada Tahun 2017 ditargetkan persentase untuk masyarakat miskin sebesar 6.76 % dan terealisasi sebesar 6,68 % dengan capaian 98,81 %.

Berkurangnya persentase masyarakat miskin diakibatkan oleh membaiknya perekonomian yang ditandai dengan kenaikan tingkat PDRB perkapita serta adanya pemerataan pendapatan. Hal ini disebabkan naiknya beberapa sektor lapangan usaha seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,59 %, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,57 % serta konstruksi sebesar 12,97 %



**SASARAN STRATEGIS 6
MENINGKATNYA KUALITAS DAN
AKSESIBILITAS JALAN**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis keenam, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keenam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	73,48	78,10	106,29	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					106,29	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran (Nilai Mean)					92,5	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan sasaran strategis 6 (enam) tercapai dengan **sangat berhasil dengan capaian 106,29%** ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Daerah . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017.

- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap
 - Pada Tahun 2017 Target untuk Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 73,48% yaitu sama dengan 871,19 Km sedangkan realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 78,10% atau sama dengan 921,44. Hal ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jalan dan



jembatan, untuk peningkatan jalan tahun 2017 dengan dana APBD dengan panjang 20 km dan 22,2 Km dengan dana DAK dengan lokasi Kegiatan di beberapa Kecamatan yaitu : Kecamatan Sei Rumbai, Tiumang, Asam Jujuhan, Padang Laweh, Sembilan Koto dan Timpeh.



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ketujuh, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

TABEL 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke tujuh

Data: Dinas Perumahan, Pemukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Rasio rumah layak huni	Persen	87,88	89,19	101,49	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					101,49	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Untuk mewujudkan sasaran strategis 7 (Tujuh) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat berhasil dengan nilai 101,49**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Rumah Layak Huni

Dari target 87,88% tercapai 89,19% dengan uraian dari 350 unit yang ditargetkan pada tahun 2017, terbangun 414 unit. Hal ini dikarenakan oleh anggaran yang dialokasikan pada tahun 2017 dari Kementerian terkait sebanyak 414 unit rumah ditambah anggaran pendampingan APBD sebesar Rp. 176.592.400,-.



SASARAN STRATEGIS 8
MENINGKATKAN AKSES TERHADAP
LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI
YANG LAYAK

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke delapan tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke delapan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Akses air minum layak	Persen	16	17,39	108,68	Sangat Berhasil
2	Akses Sanitasi layak	Persen	39,79	30	75,39	Berhasil
Rata-rata data kelompok tertimbang					92.03	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran (nilai Mean)						92,5

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan sasaran strategis 8 (Delapan) ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat berhasil dengan nilai 92,03**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak dengan target 16% tercapai 17,39%. Pada tahun 2017 penduduk yang terlayani dengan system perpipaan adalah 40.962 jiwa dengan jumlah penduduk 235.513. Hal ini bisa dicapai dengan adanya Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pelayanan Air Minum yang dikelola oleh UPT SPAM dan Kegiatan SPAM PAMSIMAS. Pada kegiatan Pengembangan Air Minum terdiri dari:

- Pengembangan Jaringan Dsistribusi sampai dengan SR dari kegiatan pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pulau Punjung
- Pengembangan Jaringan Dsistribusi sampai dengan SR dari kegiatan pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Sitiung
- Pengembangan Jaringan Dsistribusi sampai dengan SR dari kegiatan pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Sungai Rumbai



➤ Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak dengan target 39,79% dari jumlah penduduk 235.513 pada tahun 2017 baru terlayani sebanyak 93.725 atau sebesar 30%. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi seperti IPAL komunal dan MCK plus.

Kegiatan yang ada pada Tahun 2017 :

- Pembangunan program hibah air limbah setempat APBN paket I (Pulau Punjung)
- Pembangunan Program Hibah Air Limbah Setempat APBN Paket II (Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai)

**SASARAN STRATEGIS 9
MENINGKATNYA TINGKAT
KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kesembilan tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,42	70,25	99,75	Sangat berhasil
2	Pertumbuhan PDRB	Indeks	5,66	5,34	94,34	Sangat berhasil
3	PDRB Perkapita	Juta	36,000	36,770	102,13	Sangat berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					98,74	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran (nilai mean)						92,5

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke Sembilan

Sumber Data: BAPPPEDA Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 9 (sembilan) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat berhasil dengan nilai 98,74**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan ini didapatkan dari angka usia harapan hidup, harapan lama sekolah, Rata- rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Untuk usia harapan hidup



Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 70.30, harapan lama sekolah tahun 2017 12.39, Rata- rata lama sekolah 8.23, sedangkan pendapatan perkapita tahun 2017 sebesar Rp. 10.781. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 adalah 70,25, meningkat pesat dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 69,84.

➤ Pertumbuhan PDRB



Pertumbuhan produksi barang dan jasa pada tahun 2017 adalah sebesar 5,34 atau mencapai 94,34% dari target yang di tetapkan yaitu sebesar 5,66. Hal ini di karenakan adanya peningkatan pada beberapa sektor seperti sektor perdagangan dimana sektor ini mengalami peningkatan yang didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti :

1. Pengembangan peningkatan pasar Nagari dan Serikat
2. Penyusunan master plan kawasan pasar Sungai Rumbai

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan pada kegiatan Operasional Retribusi Pasar dan Kerjasama Kemitraan, dengan pengurus pasar yang dianggarkan tahun 2017.

➤ PDRB Perkapita

Kondisi ekonomi pada tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari pencapaian PDRB perkapita yang mencapai 36.777 juta atau sebesar 102,13 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 36.000 juta. Hal ini disebabkan naiknya beberapa sektor lapangan usaha seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,59 %, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,57 % serta konstruksi sebesar 12,97 %.



**SASARAN STRATEGIS 10
MENINGKATNYA PRODUKSI
DAN PRODUKTIFITAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kesepuluh tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.10Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Produksi padi	Ton	59.285	57.759,9	97,89	Sangat Berhasil
2	Produksi jagung	Ton	20.000	24.470,4	122,35	Sangat Berhasil
3	Produksi karet	Ton	37.363	29.019	77,66	Berhasil
4	Produksi sawit	Ton	87.500	108.593	124,10	Sangat Berhasil
5	Produksi Kakao	Kg	2.550.000	2.553.848,45	100,15	Sangat berhasil
6	Produksi Daging Sapi	Ton	6.000	6.636,9	110,6	Sangat Berhasil
7	Ikan Budi daya	Ton	16.000	15.564	97,27	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					104,3	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.



Untuk mewujudkan sasaran strategis 10 (sepuluh) ini didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Berhasil dengan nilai capaian 104,3**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Jumlah Produksi Padi

Jumlah produksi padi menurun dari tahun sebelumnya dan pencapaian berada di bawah target yaitu 59.285 dengan capaian 57.759,9 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan irigasi induk yang di mulai pada bulan Juni 2017 dan selesai pada bulan November di tahun yang sama, sehingga banyak sawah masyarakat yang tidak terairi oleh irigasi pada saat perbaikan tersebut.

➤ Jumlah Produksi Jagung

Jumlah produksi jagung meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.590 ton, dan pada tahun 2017 mencapai 24.470,4 ton. Hal ini disebabkan oleh sawah yang tidak teraliri irigasi akibat perbaikan di saluran induk ditanami jagung oleh masyarakat dengan penambahan luas tanam jagung dari target 2.590 Ha menjadi 3.884 Ha pada tahun 2017.

➤ Jumlah Produksi Karet



Produksi karet pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 29.019 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 37.363 ton. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebun karet masyarakat yang sudah harus diremajakan serta banyaknya alih fungsi kebun karet menjadi lahan sawit.



➤ Jumlah Produksi Sawit



Produksi sawit pada tahun 2017 sebesar 108.593 ton meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 87.500 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya program bantuan bibit sawit unggul yang dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2014 yakni sebanyak 165.000 bibit sawit yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

➤ Jumlah Produksi Kakao

Produksi Kakao pada tahun 2017 adalah sebesar 2.553.848,45 Kg, dimana realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2.500.000 Kg atau sama dengan 100,15 %. Hal disebabkan meningkatnya hasil panen masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangannya.

➤ Jumlah Poroduksi Daging Sapi

Produksi daging sapi pada tahun 2017 sebesar 6.636 Ton dari target sebesar 6.000 Ton, produksi ini di dapat dari Populasi ternak sapi yang pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan capaian 42.409 ekor dari target sebesar 42.000 ekor. Selain itu besaran produksi daging serta populasi sapi ini di pengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Berfungsinya pasar ternak yang berada di Kecamatan Sitiung;
2. Adanya bantuan ternak sapi kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
3. Adanya program wajib bunting pada bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
4. Adanya integrasi antara kebun sawit dengan sapi.

➤ Jumlah Produksi Ikan



Pada tahun 2017, capaian produksi ikan meningkat sebesar 15.564 ton berbanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 14.570 ton. Capaian ini didapat dari dua indikator kinerja bidang perikanan yaitu "Produksi perikanan budidaya dan Produksi perikanan tangkap yang didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan bantuan benih dan pakan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menysasar kepada pembudidaya ikan secara langsung. Dalam kegiatan ini Pemerintah memberikan bantuan kepada pembudi daya ikan yang sedang berkembang untuk lebih meningkatkan produksi perikana yang sedang dilakukan.

2. Kegiatan penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan

Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan bertujuan membantu pembudidaya lebih mengembangkan usaha perikanan. Kegiatan ini bukan hanya menysasar pada fisik saja namun juga non fisik, seperti pelatihan perikanan yang akan menciptakan pembudidaya yang handal.

3. Kegiatan bimbingan pengendalian penyakit ikan

Kegiatan ini berorientasi pada pemberian ilmu pengendalian hama penyakit pada ikan yang di budidayakan petani.

**SASARAN STRATEGIS 11
KETERSEDIAAN DAN CADANGAN
PANGAN**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kesebelas tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.



Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke sebelas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah Ketersediaan kalori dan protein perkapita	Kkal/Kep/hari	2.400	2.685	111,87	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					111,87	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber data : Dinas Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan sasaran strategis 11 (sebelas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat Berhasil dengan nilai 111.87** Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Jumlah ketersediaan Kalori Per-Kapita

Pada Tahun 2017 target jumlah ketersediaan kalori per kapita adalah sebesar 2.400 Kkal/Kep/Hari dengan realisasi 2.685 Kkal/Kep/Hari dengan capaian 111,87%, hal ini disebabkan oleh ketersediaan pangan di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi kebutuhan penduduk.

Tabel 3.12 : Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	Ketersediaan Protein (gr/kap/hari)	Ketersediaan Lemak (gr/kap/hari)
A	Pangan Nabati	2.354	42,07	32,40
1	Padi-padian	1.659	39,03	7,25
2	Makanan berpati	53	0,36	0,26
3	Gula	99	0,01	0,04
4	Buah biji Berminyak	11	0,35	1,06
5	Buah-buahan	55	0,60	0,25
6	Sayur-sayuran	35	1,71	0,32
7	Minyak dan lemak	441	0,01	23,22
B	Pangan Hewani			
8	Daging	139	10,16	10,65



9	Telur	34	2,67	2,39
10	Susu	-	-	-
11	Ikan	158	24	6
	Total	331	36,52	18,61

Sumber: Data olahan Dinas Pangan dan Perikanan Kab Dharmasraya

Secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati pada tahun 2017 berjumlah 2.354 kkal/kap/hari, dan ketersediaan energi pangan hewani pada tahun 2017 adalah 331 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi pangan nabati Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan pangan hewani. Ketersediaan energi terbesar disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian yaitu sebesar 1.659 kkal/kap/hari. Ketersediaan energi terkecil berasal dari buah biji berminyak yaitu sebesar 11 kkal/kap/hari. Secara keseluruhan ketersediaan energi Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 2.685 kkal/kap/hari.

Dari data yang disajikan pada tabel 5 terlihat bahwa jumlah ketersediaan protein pangan hewani lebih rendah dari pada jumlah ketersediaan protein yang berasal dari pangan nabati. Pada tahun 2017 ketersediaan protein yang berasal dari pangan nabati sebesar 42,07 gram/kapita/hari, sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 6,52 gram/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan protein pada tahun 2017 adalah 78,59 gram/kapita/hari.

Dari data yang disajikan pada tabel 3.12 terlihat bahwa jumlah ketersediaan lemak pangan nabati lebih besar dari pada jumlah ketersediaan lemak yang berasal dari pangan hewani. Pada tahun 2017 ketersediaan lemak yang berasal dari pangan nabati 32,40 gram/kapita/hari, sedangkan yang berasal dari pangan hewani 18,61 gram/kapita/hari. Ketersediaan lemak terbesar tahun 2017 disumbangkan oleh kelompok pangan minyak dan lemak sebesar 23,22 gram/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan lemak pada tahun 2017 sebesar 51,01 gram/kapita/hari.

**Tabel 3.13 : Komposisi Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak Tahun 2017**

No.	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)		
	Pencapaian	Dianjurkan	%
1	2.685	2.400	124,88
	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari)		
2	Pencapaian	Dianjurkan	%
	78,58	63	124,75

Sumber : Data olahan Dinas Pangan dan Perikanan Kab Dharmasraya

Berdasarkan tabel 3.13 diatas dapat diketahui bahwa komposisi ketersediaan energi pada tahun 2017 telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut PPH (2.400 Kkal/kapita/hari), dimana pada tahun 2016 angka kecukupan gizi yaitu 2.685 (124,88 %). Ketersediaan protein pada tahun 2017 sampai telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut PPH (63 gram/kapita/hari), dimana pada tahun 2017 ketersediaan protein 78,58 gram/kapita/hari (124,75 %).

Tabel 3.14 : Ketersediaan Energi Dibandingkan dengan Target PPH dan Konsumsi Menurut Kelompok Pangan Tahun 2017

No.	Kelompok Pangan	Realisasi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)	Target Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)	Persentase Ketersediaan Energi Terhadap Target (%)



			<i>Konsumsi</i>	<i>Penye- diaan</i>	<i>Konsum si</i>	<i>Penyedi aan</i>
1	<i>Padi-padian</i>	1.659	1.075	1.200	154,33	138,25
2	<i>Umbi-umbian</i>	62	129	144	48,06	43,06
3	<i>Pangan Hewani</i>	319	258	288	123,64	110,76
4	<i>Minyak & Lemak</i>	452	215	240	205,1	109,72
5	<i>Buah-Biji Berminyak</i>	6	64,5	72	9,3	8,3
6	<i>Kacang-kacangan</i>	5	107,5	120	4,6	4,1
7	<i>Gula</i>	99	107,5	120	92,09	82,5
8	<i>Sayur & Buah</i>	81	129	144	62,80	68,75
9	<i>Lain-lain</i>	0	64,5	72	0	0
	<i>Total</i>	2.685	2.150	2.400	124,88	111,87

Sumber : Data olahan Dinas Pangan dan Perikanan Kab Dharmasraya,

Dari tabel 3.14 diatas dapat diketahui bahwa realisasi ketersediaan energi untuk dikonsumsi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2017, bila dikaitkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH), maka realisasi ketersediaannya sebesar 2.685 Kkal/kap/hr, (mencapai 111,87 % dari target penyediaan dan 124,88 % dari target konsumsi).

Kemudian dapat pula diketahui bahwa realisasi ketersediaan energi untuk dikonsumsi pada beberapa kelompok pangan bila dikaitkan dengan target



konsumsi telah memenuhi target, diantaranya adalah padi-padian (154,33 %), pangan hewani (123,64 %) dan minyak dan lemak (205,1). Kelompok pangan yang belum memenuhi target diantaranya adalah umbi-umbian (48,06 %), buah biji berminyak (9,3 %), kelompok kacang-kacangan (4,6%), gula (92,09 %), sayur dan buah, (62,80%) , dan lain-lain (0 %).

**SASARAN STRATEGIS 12
MENINGKATKAN DAYA SAING
KOPERASI DAN UMKM**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke dua belas tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja tahun 2017.

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	50	45,27	90,54	Berhasil
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	9	13,45	149,4	Sangat berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					119,97	Sangat berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber Data: Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 12 (dua belas) ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 diperoleh nilai rata-rata capaian sasaran sebesar **119,97** dengan kategori **Sangat Berhasil**



Selengkapnya uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Jumlah Koperasi Aktif

Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif adalah sebesar 45,27 persen, dengan target sebesar 50 persen. Koperasi aktif merupakan status yang disandang oleh sebuah koperasi, dimana criteria sebuah koperasi yang di golongan sebagai koperasi aktif adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kantor koperasi
2. Kegiatan Kopersi masih berjalan
3. Anggota kepengurusan koperasi masih lengkap
4. Aktif dan rutin melaksanakan RAT

Berkurangnya jumlah koperasi aktif dikarenakan oleh banyaknya koperasi yang tidak melakukan RAT serta tidak adanya penumbuhan koperasi baru pada tahun 2017.

➤ Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menaikkan pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil (IKM) sebesar 9 %. Berdasarkan data yang diperoleh nilai produksi sentra industri kecil menengah pada tahun 2017 sebesar Rp. 193.627.841.000 sedangkan pada tahun 2016 nilai produksi sentraindustri kecil menengah adalah sebesar Rp. 170.667.423.000,-. Dari nilai produksi sentra industri kecil menengah (IKM) sebesar Rp. 22.960.418,-



**SASARAN STRATEGIS 13
MENINGKATNYA PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke tiga belas, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 3.13****Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke tiga belas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,5	63,58	95,60	Sangat berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					95,60	Sangat berhasil
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)						92,5

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan sasaran strategis 13 (tiga belas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 diperoleh nilai rata-rata capaian sasaran sebesar **95,60** dengan kategori **Sangat Berhasil**. Selengkapnya uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tanah yang masing-masing berasal dari hasil pemantauan kualitas lingkungan dan citra satelit tutupan lahan dengan perhitungan rumus yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2017, terealisasi sebesar 63,58% dengan indeks kualitas air sebesar 56,67%, indeks kualitas udara 99,78% dan indeks tutupan lahan 42,18%. Indikator ini didukung oleh program pengembalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan koordinasi penilaian Kabupaten Sehat dan Adipura.



**SASARAN STRATEGIS 14
PENINGKATAN TATA KELOLA,
AKUNTABILITAS, PEMERINTAHAN
DAERAH**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke empat belas, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke empat belas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP/TW/Disclaimer	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
2	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/Nilai	60,00	60,46	100,76	Sangat Berhasil
3	Nilai LPPD	Nilai	2,9	3,07	105,86	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					102,20	Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran						92,5

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 14 (empat belas) ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat Berhasil dengan nilai tertimbang 102,20**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

- Opini WTP atas laporan keuangan
 Sesuai dengan amanat UU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,



BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah.

Melalui proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/daerah.

Di raihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 yang dinilai pada tahun 2017 yaitu Opini BPK terhadap terhadap laporan keuangan yang menggambarkan keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam tata kelola keuangan daerah.

➤ Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permenpan RB nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dimana Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,46 atau predikat B. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk perencanaan kinerja dengan bobot 30 memperoleh nilai 20,81
2. Untuk pengukuran kinerja dengan bobot 25 memperoleh nilai 13,02
3. Untuk pelaporan kinerja dengan bobot 15 memperoleh nilai 10,14
4. Untuk evaluasi internal dengan bobot 10 memperoleh nilai 5,72
5. Untuk capaian kinerja dengan bobot 20 memperoleh nilai 10,77

➤ Nilai LPPD

Hasil evaluasi LPPD pada tahun 2017 meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari angka 2,922 menjadi



3,077. Kenaikan tersebut terjadi karena penyusunan tahun 2017 telah disertai dengan data-data pendukung yang lengkap.

**SASARAN STRATEGIS 15
MENINGKATNYA KUALITAS
PERENCANAAN DAERAH**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke empat belas, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke Lima belas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	99,72	99,72	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					99,72	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran						92,5

Sumber Data: BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 15 (lima belas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat Berhasil dengan nilai 99,92**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Persentase Pencapaian Target dan Sasaran RKPD terhadap RPJMD

Untuk menghitung capaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD, dihitung berdasarkan target RKPD terhadap realisasi RPJMD di tahun rencana. Secara umum capaian target sasaran pembangunan yaitu sebesar 99,72 persen. Ditinjau dari Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah) terdapat 16 indikator yang capaiannya melebihi 100%, sedangkan untuk IKU Daerah lainnya secara keseluruhan berada diatas angka 70%. Oleh karena itu dengan melihat capaian tahunan yang mencapai angka 99,72% tersebut, maka target akhir RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun ketiga hingga tahun kelima periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang di dalam RPJMD optimis dapat tercapai. Namun ke depan tugas Pemerintah



Daerah adalah meningkatkan kualitas Perencanaan, melalui proses perencanaan tahun RKPD yang Berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam penganggaran. Sehingga Konsistensi perencanaan dan Penganggaran dapat terwujud dan prinsip efektifitas dan efisiensi dapat dilaksanakan secara baik.



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke lima belas, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke enam belas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	71,83	74,50	103,71	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					103,71	Sangat berhasil
Rata-ratacapaian sasaran						92,5

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan sasaran strategis 16 (enam belas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat berhasil dengan nilai 103,71** Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Rata-Rata Ketergantungan Dana Transfer

Indikator kinerja tersebut untuk mengetahui peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 74,50% dengan target sebesar 71,83% yang merupakan perbandingan antara Dana Perimbangan dibagi dengan APBD dengan sumber PAD sebesar Rp. 98.914.391.758,-, Dana Perimbangan Rp. 696.906.890.931,-, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 153.192.446.540,-.



**SASARAN STRATEGIS 17
MENINGKATKAN PEMBINAAN
PEMERINTAHAN NAGARI**

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke tujuh belas, tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel.3.17

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh belas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	50	31	138	Sangat Berhasil
Rata- rata data kelompok tertimbang					138	Sangat Berhasil
Rata-rata capain sasaran (nilai Mean)						92,5

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan sasaran strategis 17 (tujuh belas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Sangat Berhasil dengan nilai 138%**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ Jumlah Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Capaian persentase Nagari yang tertinggal pada tahun 2017 adalah sebesar 31% dengan capaian 138 % dari target sebesar 50%. Sebanyak 52 Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Jumlah Desa/Nagari tertinggal didasarkan pada Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/354/KPTS-BUP/2017 tentang Penetapan Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang dan Nagari Maju di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 16 Nagari yang masuk kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal.

Daftar Nagari Sangat Tertinggal Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nagari Lubuk Karak
- b. Nagari Banai
- c. Nagari Sungai Limau
- d. Nagari Sinamar
- e. Nagari Lubuk Besar
- f. Nagari Tanjung Alam
- g. Nagari Alahan Nan Tigo



Sedangkan Nagari Tertinggal Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nagari Silago
- b. Nagari Koto Nan IV Dibauah
- c. Nagari Timpeh
- d. Nagari Padang Laweh
- e. Nagari Ampang Kuranji
- f. Nagari Koto Salak
- g. Nagari Pulau Mainan
- h. Nagari Abai Siat
- i. Nagari Bonjol.

Untuk mengurangi jumlah Nagari Sangat Tertinggal dan Tertinggal ini secara berkelanjutan dilakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Nagari berupa sosialisasi dan pembinaan terhadap peraturan-peraturan pembangunan di Nagari. Selain itu dilakukan juga pendampingan kepada Nagari dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan juga pertanggung jawaban dengan didukung anggaran PAP sebesar Rp. 935.691.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 920.774.236,- atau sama dengan 98,41%.



**SASARAN STRATEGIS 18
TERLAKSANANYA PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DHARMASRAYA**



Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke delapan belas , tahun 2017, realisasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017.

Tabel. 3.18

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke delapan belas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah potensi cagar budaya yang dikembangkan	Angka	7	5	71,42	Berhasil
						Berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran						92.5

Sumber : Dinas Parbudpora, Tahun 2017

Untuk mewujudkan sasaran strategis 18 (delapan belas) ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja Daerah dengan capaian **Berhasil dengan nilai 71,42%** Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dengan indikator sebagai berikut:

➤ **Persentase potensi cagar budaya yang dikembangkan**

Jumlah cagar budaya yang di kembangkan pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 7 cagar budaya, dan terealisasi 5 cagar budaya diantara nya:

1. Cagar Budaya Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung yang berada di Kecamatan Pulau Punjung
2. Rumah Gadang Kerajaan Sungai Kambut yang berada di Kecamatan Pulau Punjung
3. Rumah Gadang Rajo Kerajaan Tiang Panjang yang berada di Kecamatan Pulau Punjung



4. Rumah Pasanggrahan yang berada di Kecamatan Pulau Punjung
5. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur yang berada di Kecamatan Sitiung.

Sementara beberapa peninggalan sejarah seperti :

1. Candi Pulau sawah
2. Candi Padang Roco
3. Masjid Tua Siguntur
4. Makan Datuk Gadang Sikabau
5. Makam Raja-Raja Siguntur

Dan beberapa peninggalan sejarah lainnya belum tercatat sebagai cagar budaya.



BAB - IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 18 (Delapanbelas) sasaran dan didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar **99,92%** dengan kategori **Berhasil sampai sangat berhasil**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 sasaran strategis, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) sasaran strategis dengan hasil sangat berhasil dengan nilai capaian 92,5, 3 (tiga) sasaran strategis dengan hasil Berhasil dengan perolehan nilai capaian 77,5.



Keberhasilan capaian kinerja sasaran, tentunya bukan hanya keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya semata, tetapi berkat adanya partisipasi bersama dari dunia usaha, masyarakat, serta *civil society* secara umum. Pencapaian kinerja yang sudah lebih baik ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk memfokuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
- b. Komitmen bersama antara Bupati, DPRD dan seluruh Kepala SKPD untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional guna menghadirkan *god and client governance* guna meraih Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya.

Menindaklanjuti isu-isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2017, maka langkah – langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Menjadikan capaian kinerja tahun 2017 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan perencanaan kinerja pada tahun yang akan datang dengan mengalokasikan anggaran memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan memilikidayaungkit menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
- b. Menyelaraskan antara indikator kinerja pendukung yang ada di SKPD dengan indikator kinerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dengan pengawasan dan monitoring memperkuat kematangan sistem pengendalian interim pemerintah.



Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.



**LAMPIRAN II
PERJANJIAN
KINERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Paku Pungung, 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,57
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,39
3	Mengurangi pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja yang terlatih dan berkompentensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,70
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,99
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,91
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	47,47
5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	Persen	6,76
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	73,48
7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	Rasio rumah layak huni	Persen	87,88
8	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	16
		Akses Sanitasi Layak	Persen	39,79
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,42
		Pertumbuhan PDRE	Indeks	5,66
		PDRB Per Kapita	Juta	36.000
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Jumlah produksi padi	Ton	59.285
		Jumlah produksi jagung	Ton	20.000
		Jumlah produksi karet	Ton	37.363
		Jumlah produksi sawit	Ton	87.500
		Jumlah produksi kakao	Kg	2.550.000
		Jumlah produksi daging sapi	Ton	6.000
11	Ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan kalori dan protein per kapita	Kkal/Kep/hari	2.400
12	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	persen	50
		Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	persen	9
13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks kualitas lingkungan	Indeks	66,5



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
		hidup		
14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	WTP
		Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	60,00
		Nilai LPPD	Nilai	2,9
15	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	Persen	100
16	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	71,83
17	Meningkatkan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	50
18	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah potensi nagar budaya yang dikembangkan	Persen	7

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Pelayanan ADM Perkantoran	Rp.	2.225.662.450,-
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	1.188.111.500,-
3.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rp.	7.204.190.550,-
4.	Pendidikan Menengah	Rp.	6.546.301.800,-
5.	Pendidikan Non Formal	Rp.	728.885.800,-
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	760.864.460,-
7.	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Rp.	50.000.000,-
8.	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp.	1.083.934.000,-
9.	Managemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	21.923.833.500,-
10.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	3.806.755.245,-
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.208.378.400,-
12.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	5.929.688.948,-
13.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	496.870.700,-
14.	Kesehatan Jiwa	Rp.	55.690.000,-
15.	Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	144.431.500,-
16.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	456.561.950,-
17.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	2.977.174.050,-
18.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp.	22.250.000.000,-
19.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp.	5.658.573.000,-
20.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	122.053.000,-
21.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	540.177.250,-
22.	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Rp.	3.181.763.750,-
23.	Perbaiki Gizi Masyarakat	Rp.	297.119.000,-
24.	Pengembangan lingkungan sehat	Rp.	492.663.200,-



	PROGRAM		ANGGARAN
25.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp.	590.842.000,-
26.	Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin	Rp.	36.227.000,-
27.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp.	11.650.080.640,-
28.	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp.	86.796.350,-
29.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp.	393.471.200,-
30.	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Rp.	10.332.942.950,-
31.	Kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Rp.	163.050.250,-
32.	Peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD)	Rp.	26.890.620.000,-
33.	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	Rp.	2.297.303.300,-
34.	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS, RSJ/ RSP/ RSM	Rp.	4.500.000.000,-
35.	Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.	5.803.400.644,-
36.	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	1.823.024.775,-
37.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.	27.454.744.600,-
38.	Pengembangan infrastruktur pedesaan	Rp.	13.630.550.000,-
39.	Pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	111.330.650.000,-
40.	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Rp.	8.207.179.910,-
41.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp.	7.970.941.550,-
42.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp.	24.452.240.000,-
43.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	30.000.000,-
44.	Rehabilitas/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.	12.109.500.000,-
45.	Pengembangan kinerja pengelolaan air, minum dan air limbah	Rp.	9.081.447.600,-
46.	Pengembangan Tata Ruang	Rp.	7.499.410.000,-
47.	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan	Rp.	2.111.487.388,-
48.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	506.094.725,-
49.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp.	136.215.000,-
50.	Pengembangan perumahan	Rp.	740.489.250,-
51.	Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Rp.	10.000.000,-
52.	Pembangunan Infra Struktur Pedesaan	Rp.	6.971.036.910,-
53.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.	500.000.000,-
54.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	240.100.000,-
55.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp.	1.419.673.200,-
56.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	2.052.920.500,-
57.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.	33.993.500,-
58.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Rp.	1.898.752.000,-
59.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	386.361.900,-
60.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.	304.226.400,-
61.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	25.050.000,-
62.	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp.	710.733.000,-
63.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp.	160.672.500,-
64.	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Rp.	23.865.000,-
65.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Rp.	105.843.000,-
66.	Perlindungan dan jaminan sosial	Rp.	104.207.000,-
67.	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp.	153.615.000,-



	PROGRAM		ANGGARAN
68.	Penguatan Kelembagaan Pengurusan Gender dan Anak	Rp.	109.220.000,-
69.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	66.937.500,-
70.	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	336.728.500,-
71.	Keluarga Berencana	Rp.	2.248.996.300,-
72.	Kesehatan reproduksi Remaja	Rp.	58.690.500,-
73.	Pelayanan Kontrasepf	Rp.	9.746.500,-
74.	Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	Rp.	5.841.050,-
75.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.	711.780.000,-
76.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan	Rp.	32.637.700,-
77.	Optimisasi pegelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp.	286.279.300,-
78.	Pengembangan budidaya perikanan	Rp.	1.453.010.760,-
79.	Pengembangan dan peningkatan instalasi pembenihan ikan	Rp.	671.465.550,-
80.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp.	172.542.750,-
81.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Rp.	380.486.750,-
82.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp.	156.779.800,-
83.	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	409.414.500,-
84.	Penataan administrasi kependudukan	Rp.	1.443.609.500,-
85.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	1.354.757.050,-
86.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp.	116.326.300,-
87.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp.	282.543.500,-
88.	Pengutan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Rp.	767.254.550,-
89.	Peningkatan pelayanan angkutan	Rp.	298.420.000,-
90.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	303.946.500,-
91.	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rp.	1.495.404.500,-
92.	Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp.	193.426.200,-
93.	Kerjasama informasi dengan mas media	Rp.	416.775.000,-
94.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Rp.	49.168.500
95.	Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Rp.	19.787.000,-
96.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rp.	128.975.500,-
97.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	75.444.500,-
98.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	4.550.000.000,-
99.	Pengembangan industri kecil dan menengah	Rp.	614.892.300,-
100.	Peningkatan efisiensi dan daya saing perdagangan pada internal Wilayah maupun eksternal wilayah	Rp.	45.719.000,-
101.	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Rp.	340.000.000,-
102.	Peningkatan promosi dan kerjasama (investasi)	Rp.	215.996.000,-
103.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp.	142.801.750,-
104.	Peningkatan pelayanan perizinan	Rp.	368.332.450,-
105.	Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	18.992.500,-
106.	Pengembangan nilai budaya	Rp.	161.175.000,-
107.	Pengelolaan kekayaan budaya	Rp.	101.500.000,-
108.	Pengelolaan keragaman budaya	Rp.	186.890.000,-
109.	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp.	21.800.000,-
110.	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Rp.	2.804.480.000,-
111.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Rp.	567.460.000,-



PROGRAM		ANGGARAN
112.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Rp. 404.757.000,-
113.	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 168.333.500,-
114.	Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 617.929.000,-
115.	Pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 77.172.000,-
116.	Pengembangan kemitraan	Rp. 48.512.000,-
117.	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 2.179.000,-
118.	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp. 113.201.250,-
119.	Penyelamatan pelestarian arsip daerah	Rp. 69.030.750,-
120.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rp. 147.348.000,-
121.	Peningkatan kesejahteraan petani	Rp. 1.440.006.024,-
122.	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Rp. 10.112.156.938,-
123.	Peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 1.136.903.650,-
124.	peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Rp. 680.934.000,-
125.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 297.907.000,-
126.	Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Rp. 514.510.000,-
127.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp. 412.975.100,-
128.	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu pertanian/ perkebunan/ peternakan secara berkelanjutan.	Rp. 99.902.196,-
129.	Pengembangan wilayah tertinggal	Rp. 296.903.600,-
130.	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Rp. 376.178.975,-
131.	Peningkatan kesempatan kerja	Rp. 165.121.500,-
132.	Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Rp. 88.993.500,-
133.	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 1.777.098.750,-
134.	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	Rp. 260.445.000,-
135.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp. 19.691.000,-
136.	Perencanaan social dan budaya	Rp. 620.356.500,-
137.	Perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1.163.548.150,-
138.	Perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 210.000.000,-
139.	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 156.913.000,-
140.	Perencanaan tata ruang	Rp. 756.000.000,-
141.	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Rp. 81.775.000,-
142.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 3.515.746.600,-
143.	Pembinaan dan pengembangan aparaturng	Rp. 597.279.500,-
144.	Pendidikan kedinasan	Rp. 114.662.300,-
145.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp. 1.762.468.200,-
146.	Penataan peraturan perundang-undangan	Rp. 559.768.600,-
147.	Peningkatan disiplin aparaturng	Rp. 237.000.000,-
148.	Pembinaan dan pemantauan aparaturng	Rp. 92.144.000,-
149.	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Rp. 27.108.000,-
150.	Pembinaan keagamaan masyarakat	Rp. 1.690.612.000,-
151.	Pengembangan manajemen pelayanan public	Rp. 977.465.000,-
152.	Pengembangan wilayah perbatasan	Rp. 349.790.500,-
153.	Optimalisasi lintas terpadu	Rp. 745.804.500,-
154.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp. 126.020.000,-
155.	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Rp. 82.465.500,-
156.	Peningkatan Kehidupan Beragama	Rp. 1.171.129.000,-
157.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media masa	Rp. 5.165.221.500,-
158.	Pengembangan Data/Informasi	Rp. 174.736.500,-
159.	Peningkatan dan Pengembangan dan pengelolaan keuangan Daerah	Rp. 129.166.500,-
160.	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan social	Rp. 592.054.000,-



PROGRAM		ANGGARAN
161.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp. 13.542.958.700,-
162.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.376.808.709,-
163.	Program penyelesaian musyawarah pembangunan desa	Rp. 247.995.000,-
164.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 867.636.500,-
165.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 113.669.000,-
166.	Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 112.450.500,-
167.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Rp. 175.107.000,-
168.	Pendidikan Politik masyarakat	Rp. 89.344.250,-
169.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 627.193.200,-
	TOTAL	Rp. 480.458.613.887,-

Pulau Punjung,

2017


BUPATI DHARMASRAYA
[Handwritten Signature]
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



LAMPIRAN III
PENGUKURAN
KINERJA



**PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN DHARMSRAYA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Measasi	Capaian (%)	Kategori
Strategi 1 Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat						
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,37	73,3	99,60	Sangat Baik
Strategi 2 Meningkatkan Tingkat Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Lulus Sekolah	Orang	8,33	8,33	100,00	Sangat Baik
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,26	101,17	Sangat Baik
Strategi 3 Mempromosikan Pengawasan dan Pengawasan Tenaga Kerja yang Tertatih dan Serampakan						
1	Persentase Target Penetapan Anggaran Kerja (TPAK)	%	67,7	65,5	96,89	Sangat Baik
2	Mencapainya Tingkat Pengangguran	%	3,99	3,66	91,97	Sangat Baik
Strategi 4 Meningkatkan Kesehatan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,01	85,29	99,30	Sangat Baik
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	47,47	47,47	100,00	Sangat Baik
Strategi 5 Meningkatkan Pemenuhan Sosial di Masyarakat						
1	Persentase Masyarakat miskin	%	6,75	6,66	98,82	Sangat Baik
Strategi 6 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan						
1	Progres Pembangunan Jalan Desa Kondisi Mantap	%	73,48	75,1	100,99	Sangat Baik
Strategi 7 Meningkatkan Kualitas Perumahan Masyarakat						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	87,85	89,19	101,40	Sangat Baik



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Status
Strategi 5 Kwalifikasi Akademi Terpadu Layanan Air Minum dan Sanitasi Yang Layak						
1	Akses Air Minum Bersih	%	10	17,20	100,00	Sangat Berhasil
2	Akses Sanitasi Liris	%	30,70	30	75,15	Berhasil
Strategi 7 Meningkatnya Tingkat Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat						
1	Infeksi Perdarahan Malaria	Indeks	70,42	70,03	99,73	Sangat Berhasil
2	Permasalahan TBC	Indeks	5,60	5,21	93,14	Sangat Berhasil
3	PM2.5 Perkiraan	µm	24,000	26,756	100,13	Sangat Berhasil
Strategi 10 Meningkatnya Produktivitas dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan						
1	Produksi Padi	Ton	89.243	87.759,90	97,46	Sangat Berhasil
2	Produksi Jagung	Ton	20.020	21.470,40	105,75	Sangat Berhasil
3	Produksi Kacang	Ton	77,263	29,036	77,60	Berhasil
4	Produksi Bawang	Ton	87.300	108,601	124,10	Sangat Berhasil
5	Produksi Kelapa	Kg	2.530.000	2.533.646,45	100,13	Sangat Berhasil
6	Produksi Daging Sapi	Ton	6,000	0,630,00	110,00	Sangat Berhasil
7	Produksi Daging Ayam	Ton	16,000	13,204	87,37	Sangat Berhasil
Strategi 11 Ketersediaan dan Cadangan Pangan						
1	Jumlah Ketersediaan Akumulasi dan Pasokan Pangan	kg/ha	2.500	2,645	113,87	Sangat Berhasil
Strategi 12 Meningkatnya Daya Saing Masyarakat dan UMKM						
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	93	10,27	90,91	Sangat Berhasil
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	0	13,45	140,40	Sangat Berhasil
Strategi 13 Meningkatnya Penguasaan Pemanfaatan Lingkungan						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,5	61,38	90,0	Sangat Berhasil

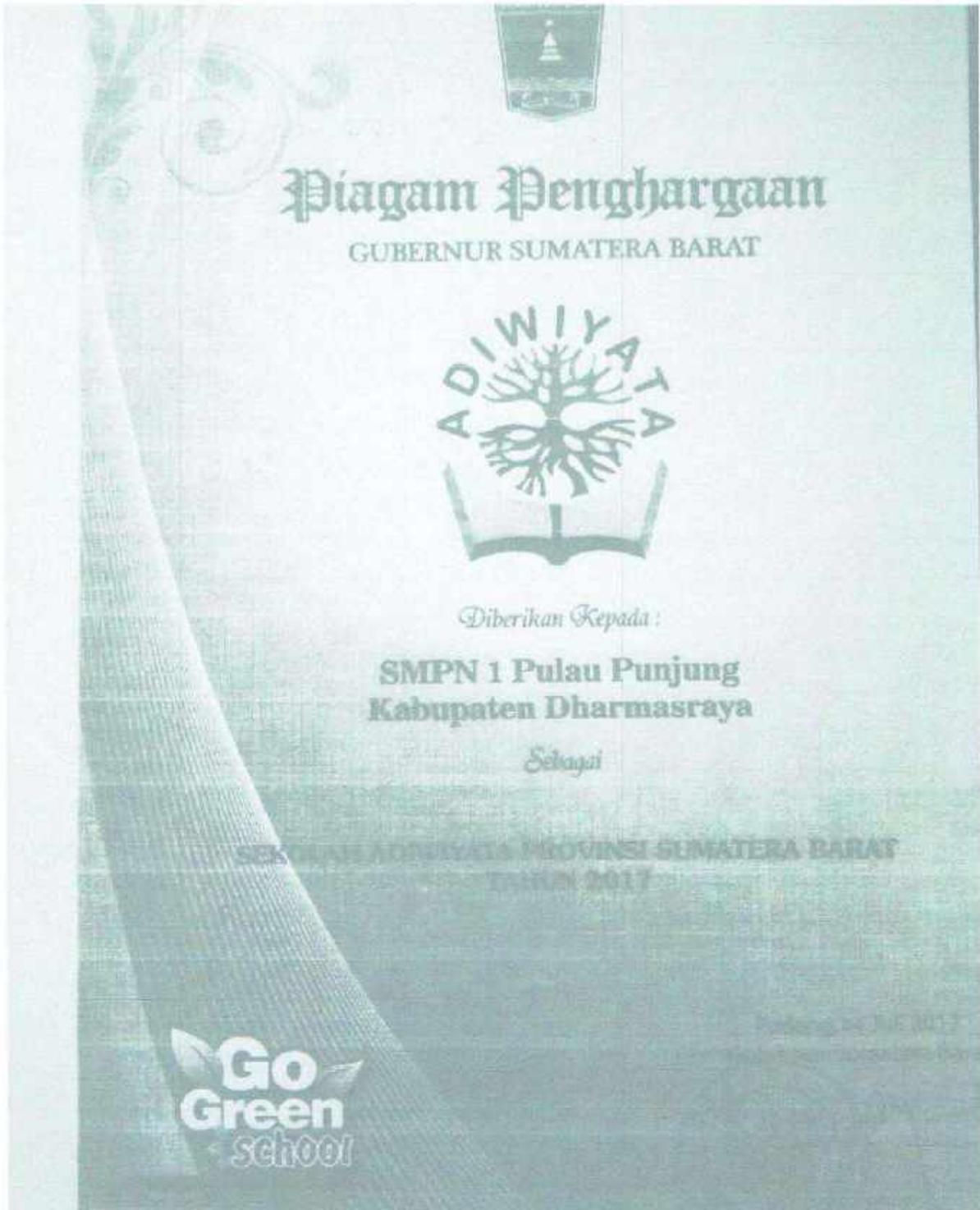


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Rencana Strategis 14 Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, Penguatan Daerah						
1	Oporsi WTP atas laporan keuangan	OP/TW/DK	WTP	WTP	100,0	Sangat berhasil
2	Shift realisasi APB	realisasi/NU	60	66,40	110,6	Sangat berhasil
3	DBH LPPU	DBH	2,0	3,07	153,5	Sangat berhasil
Rencana Strategis 15 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah						
1	Persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPMD	Persen	100	99,92	99,9	Sangat berhasil
Rencana Strategis 18 Meningkatnya Kemandirian Sektor						
1	Intervensi keberagaman dan transfer	Persen	71,63	71,5	100,0	Sangat berhasil
Rencana Strategis 17 Strategisnya Fundlisan Pemerintahan Rajasi						
1	Persentase rajasi tertinggi dan sangat tertinggi	Persen	30	31	103,0	Sangat berhasil
Rencana Strategis 16 Terlaksananya Pelaksanaan Warisan Budaya Dharmasraya						
1	Jumlah pelestari naga budaya yang dikembangkan	Angka	7	5	71,4	Berhasil


SUPATI DHARMASRAYA,
SUTAN RISKI TUANKU KERAJAAN, SE



**LAMPIRAN IV
PENGHARGAAN
DAN PIAGAM**



















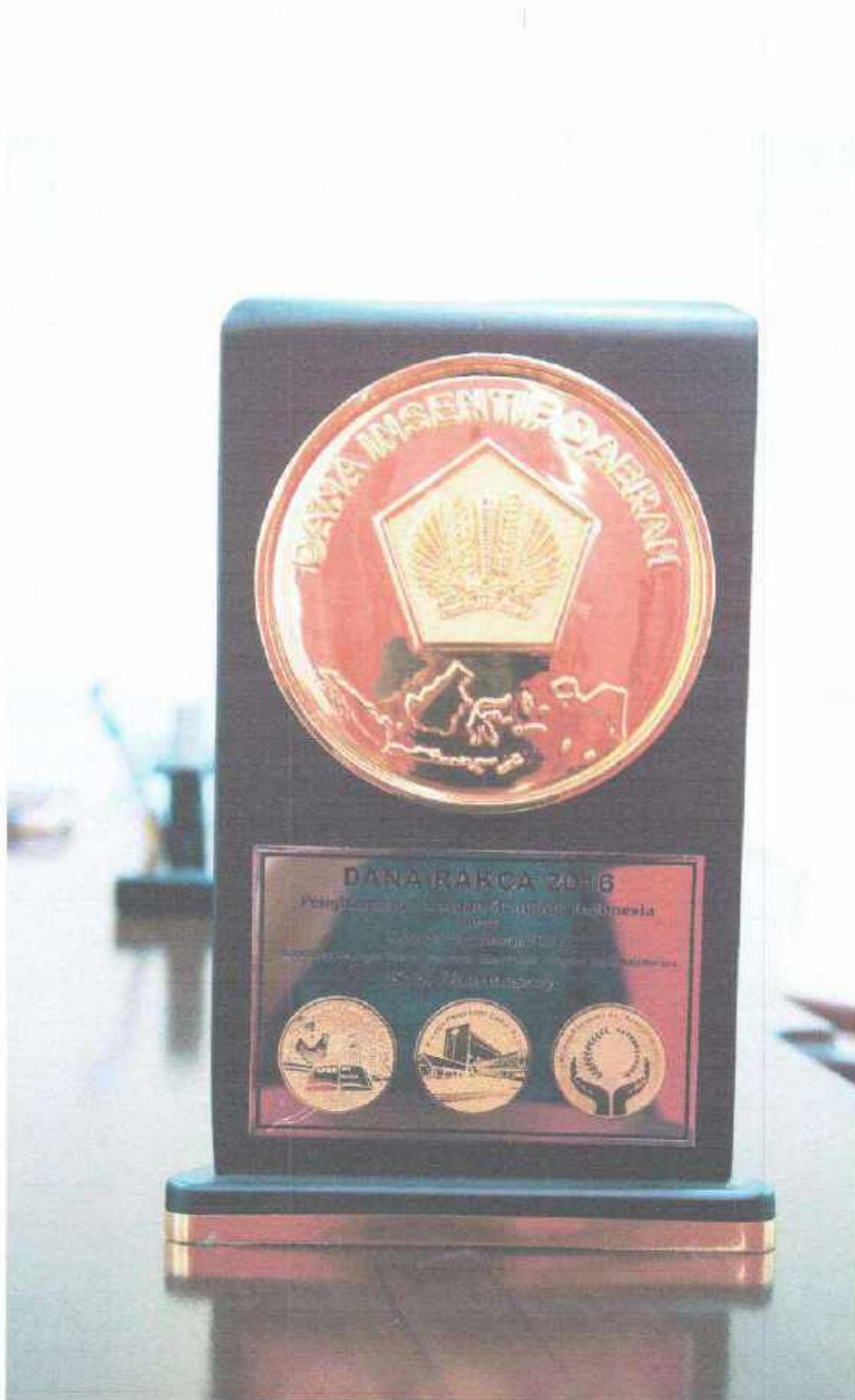














PENERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Diagam Penghargaan

Diberikan kepada :

NAGARI KOTO RANAH

Kecamatan Koto Besar, Kab. Dharmasraya

Peringkat Terbaik I

Atas keberhasilan pada penilaian publikasi dan transparansi penggunaan Dana Desa 2017 Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penilaian ini atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Persatuan Wartawan Indonesia dalam rangka Hari Pers Nasional.


GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO

Padang, 9 Februari 2018

KETUA UMUM PWI PUSAT,


MARGIONO











